



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**L
A
K
I
P**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : Januari 2023

**PILKEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA**



**Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660819 199603 1 002**

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	
1.1 Struktur Organisasi	7
1.2 Fungsi dan Tugas	9
1.3 Isu – Isu Strategis	10
1.4 Keadaan Pegawai	11
1.5 Sasaran dan Program	13
1.6 Keuangan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.1.3 Strategi, program dan kegiatan	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
3.1 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2022	34
3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	37
3.1.2 Sasaran RPJMD	37
3.1.3 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibelanjakan	38
3.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	43
3.2 Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2021	60
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Rencana Strategis	89
3.4 Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	89
3.5 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta alternative solusinya	89
3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91
3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan	92
Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	
B. REALISASI ANGGARAN	
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Rencana Tindak Lanjut	102
BAB V LAMPIRAN	

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama tahun anggaran 2022.

Tujuan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.3 Sistematika Laporan Kinerja Instransi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.

Adapun sistematika LAKIP sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang : Bab ini menjelaskan Latar Belakang penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat daerah dan Tujuan dari Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja

B. Gambaran Umum Oragnisasi

Penjelasan Umum Organisasi yang menjelaskan Fungsi dan Kewenangan serta Struktur Organisasi dengan dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Induk dan Perubahan
2. Dokumen Lain yang dianggap perlu

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan instansi pemerintah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang . Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator Program Anggaran dan Keuangan (Jabatan Fungsional), sedangkan Kesatuan Bangsa Terdiri dari Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan , Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka guna melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 2. Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional; dan
 2. Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional; dan
 2. Jabatan Fungsional.

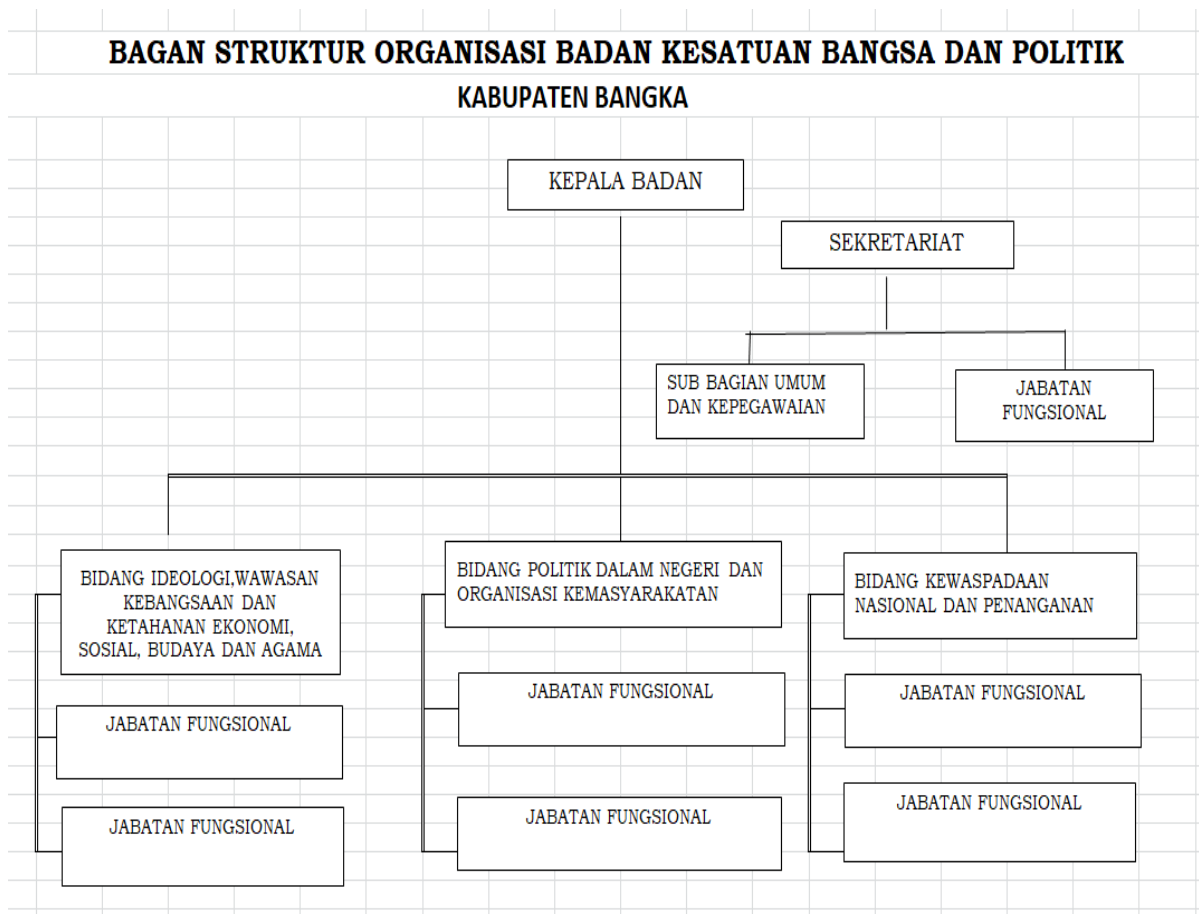
e. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang terdiri dari:

1. Jabatan Fungsional dan
2. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1

**Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka**



1.2 Fungsi dan Tugas

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

- wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, antara lain sebagai berikut:

1. Isu persatuan dan kesatuan nasional.
2. Kondisi keamanan dan ketertiban.
3. Deteksi dini potensi konflik.
4. Optimalisasi forum-forum komunikasi daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat dipengaruhi oleh kondisi internal perangkat daerah. Diantara kondisi internal yang dapat berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Dukungan SDM yang masih terbatas dalam menangani masalah tertentu.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Kerjasama (*networks*) antar perangkat daerah, organisasi politik dan masyarakat, serta mitra Aparatur Penegakan Hukum lainnya yang belum optimal.

Selain kondisi internal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi permasalahan di luar kewenangannya, yang bagaimanapun juga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diantara permasalahan tersebut adalah meningkatnya jumlah pendatang dan WNA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bangka.

Masalah Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bangka semenjak tahun

2019 sampai tahun 2021 yang berakibat pada tatanan hidup masyarakat serta menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berakibat hilangnya lapangan pekerjaan, PHK, daya beli masyarakat dan lainnya, yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat, yang sampai sekarang masih berdampak dan belum terjadi nya pemulihan ekonomi masyarakat yang signifikan. Hal ini menuntut perencanaan yang strategis agar tugas, fungsi dan wewenang dapat dilaksanakan dengan baik dalam satu tahun kedepan.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya aparatur yang berjumlah 31 Orang terdiri dari 19 orang PNS dan 12 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah dan komposisi pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel berikut:

Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan Tahun 2022

No	Jabatan	Pangkat /Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Kepala Badan	Pembina Utama Muda IV/C	1 orang
2	Kepala Bidang	Pembina IV/A	3 orang
3	Kepala Sub Bagian	Penata /III c	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Muda TK I/III b Penata / III c Penata TK I/III d Pembina / IV a	1 orang 1 orang 4 orang 1 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda III/A Pengatur II/C dan Pengatur TK I/II d	1 orang 5 orang 1 orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Eselon Tahun 2022

No.	Eselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1.	II	1				1	
2.	III	1		2	1	4	
3.	IV		1			1	
	Jumlah	2	1	2	1	6	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Tahun 2022

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			PHL			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat.	2	4	6	2	5	7	13
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	6	-	6	-	1	1	7
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4	1	5	1	-	1	6
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	2	3	1	1	2	5
	Jumlah	13	7	20	4	7	11	31

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	-	2
2.	S1	7	4	11
3.	D3		2	2
4.	SLTA	4		4

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Golongan Tahun 2022

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	I	-	-	-	-	-
2	II	-	-	1	2	3
3	III	2	2	3	4	11
4	IV	5	1	-	-	6
	Jumlah					20

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jabatan Tahun 2022

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Struktural	4	2	6
2.	Jabatan Fungsional	4	3	7
3.	Tenaga Teknis Lainnya	-	-	-
4.	Arsiparis	-	-	-
5.	Staf/Administrasi/tata Usaha			
	Jumlah	3	2	6

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	-	-	-
2.	S1	1	1	2
3.	D3	-	2	2
4.	SLTA	2	5	7

1.5 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Kantor yang dimiliki Badan Kesbangpol dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Daftar Aset/Sarana dan Prasarana dan
Kondisinya Per Desember 2022

NO	JENIS	KONDISI (B/KB/RB)	NILAI
1.	Tanah	1	330.336.000
2.	Gedung dan Bangunan	1	801.285.000
3.	Bangunan Tempat Tinggal	1	-
4.	Kendaraan	1	381.349.200
5.	Alat-alat kantor/rumah tangga	1	178.532.000
5.	Alat studio dan komunikasi	1	29.300.000

6.	Aset tetap Renovasi (ATR)	1	40.666.000
7.	BMD Ekstrakomptabel	1	473.000
JUMLAH			1.761.941.200,00

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 6.882 M² yang merupakan tanah bangunan gedung.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua unit dengan luas 258 M² yang terletak di Jalan ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan Komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2022 sebanyak 7 unit yang terdiri dari 2 unit Kendaraan roda empat minibus serta 5 unit kendaraan roda dua.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bangka. Pada tahun anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.102.813.103,00 dengan rincian belanja operasi Rp 4.989.500.303,00 dan belanja modal Rp 113.312.800,00 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 yang disahkan mulai 01 Agustus 2022, menjadi sebesar Rp. 5.312.528.728,00, dengan rincian belanja operasi Rp 5.193.759.728,00 dan belanja modal Rp 118.769.000,00, yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.9

Daftar Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 (perubahan)

No	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	Rp 5.193.759.728,00
2.	Belanja Modal	Rp 118.769.000,00
	Jumlah Total Anggaran (Setelah Perubahan)	Rp 5.312.528.728,00

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014- 2018).

RPJMD Kabupaten Bangka merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2023.

Berikut ini Tujuan Sasaran dan Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 berdasarkan tabel di bawah ini :

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	4	5	6	7	8					8
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	80%	85%	90%	100%	100%	62,50 %	78,43 %	-
2		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	30%	30%	60%	65%	70%	94,34%	70%	100%	100%	-
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	CC	70,10 (BB)	70,10 (BB)	71,51 (BB)	71,51 (BB)	CC	70,10 (BB)	71,51 (BB)	71,51 (BB)	

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 mempunyai Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia)". Sedangkan Misi Kabupaten Bangka adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan visi misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang menjadi urusan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada Misi ke empat yaitu "Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional". Guna mewujudkan Visi Bangka Setara dan Misi tersebut maka disusunlah sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama 5 tahun anggaran adalah:

Tabel 2.1
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

NO.	TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	100%	80%	85%	90%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	30%	60%	65%	70%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	CC	70,10	70,10	71,51

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
3	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik

		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
--	--	---	--

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA.

Dari sasaran yang telah ditetapkan dan di jelaskan pada Tabel 2.3 maka di buatlah perjanjian kinerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara Kepala Badan Kesbangpol dan Bupati Bangka yang ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2022 (terlampir), yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	B (70,10)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.837.532.320,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30.000.000,00	APBD

3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	972.989.783,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	180.000.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	72.291.000,00	APBD
TOTAL		5.102.813.103,00	

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkula melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan dan rasionalisasi anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	B (71,51)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.052.927.945,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30.000.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	972.989.783,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	10.000.000,00	APBD

	Organisasi Kemasyarakatan		
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	183.080.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	63.531.000,00	APBD
TOTAL		5.312.528.728,00	

Selanjutnya dalam perjanjian kinerja tersebut, guna mendukung pencapaian sasaran strategis maka ditetapkan juga program-program pendukung, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada 10 Oktober 2022 ditandatangani lagi Perjanjian Kinerja Perubahan (terlampir) antara Bupati Bangka dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. Dalam Perkin Perubahan ini yang terjadi perubahan adalah anggaran kegiatan dan Target Pencapaian Kegiatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	B (71,51)
----	--	--------------------------------------	----------------	-----------

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.052.927.945,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30.000.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	972.989.783,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	183.080.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	63.531.000,00	APBD
TOTAL		5.312.528.728,00	

Untuk melaksanakan program-program tersebut selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kinerja dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris mencakup sasaran strategis dan indikator yang akan dicapai yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	%	100
		2.	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	%	100
		1.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	5
		2.	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan	19
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	%	100
		2.	Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar.	%	100
		1.	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2
3.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	%	18,75
		2.	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	%	100
		3.	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100
			Jumlah Pakaian Olah Raga yang Tersedia	Stell	16

4.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	%	100
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	Bulan	12
5.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	%	30
		1.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang	Paket	1
		2.	Diadakan Jumlah Mebel Kantor yang Diadakan	Paket	1
6.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	%	100
		2.	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Layanan	3
		1.	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Bulan	12
		3.	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Bulan	12
		4.	Jumlah layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12
	7.		Persentase BMD dalam kondisi baik	%	65
	Sasaran Sub Kegiatan :	1.	Jumlah peralatan dan	Paket	1

	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.	perlengkapan kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	(7 unit) Kendaraan Roda Dua dan 5 unit Kendaraan Roda Empat
		3.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1

Sedangkan program yang menjadi tanggung jawab Sekretaris adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk level eselon IV dan Sub Koordinator (Fungsional) dibuat Perjanjian Kinerja eselon IV dan Sub Koordinator antara Sekretaris dan Kasubbag. Yaitu:

a. Sub Koordinator Program Anggaran dan Keuangan (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	5
		2.	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan	19
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2
		3	Jumlah Dokumen Pencairan yang di Verifikasi	Dokumen	12
		4	Jumlah Dokumen SPP dan SPM SIPD dan SIMDA	Dokumen	24

b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah		Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	Stell	16
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	Bulan	12
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	1
		2.	Jumlah mebel kantor yang diadakan	Paket	1
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Bulan	12
		3.	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Bulan	12
		4.	Jumlah layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Paket	1
		2.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	7

2. Perjanjian Kinerja Bidang Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mencakup sasaran strategis dan indikator yang akan dicapai yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pemantapan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Peserta Seminar Wawasan Kebangsaan yang hadir	% Orang	80 40
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	% Orang	90 40

Sedangkan program yang menjadi tanggung jawab Bidang Wasbang & Ketahanan Ekonomi, Sosbud & Agama adalah :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Untuk level Sub Koordinator (Jabatan Fungsional) di Bidang Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan Agama dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala bidang dan Sub Koordinator (Jabatan Fungsional). Yaitu:

a. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama (Analisis Kebijakan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama 2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 3. Jumlah Forum Kerukunan umat beragama yang difasilitasi 4. Tersediannya Laporan Penggunaan Dana Hibah FKUB	Orang Laporan Forum Laporan	40 1 1 1

Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama adalah:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

b. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Analisis Kebijakan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	1. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seminar Wawasan Kebangsaan yang hadir	Orang	40

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan adalah:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Perjanjian Kinerja Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik mencakup :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sasaran Sub Kegiatan : a. Terlaksananya Pemantauan Orang Asing b. Terlaksananya FORKOPIMDA	Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing Jumlah Laporan Forkopimda	% Laporan Laporan	90 2 1

Sedangkan program yang menjadi tanggung jawab Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik adalah :

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Untuk level Jabatan Fungsional di Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala bidang dan Jabatan Fungsional. Yaitu:

a. Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen (Analisis Kebijakan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya FORKOPIMDA	Jumlah Laporan Forkopimda	Laporan	1

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

b. Sub Koordinator Penanganan Konflik (Analisis Kebijakan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing	Laporan	1

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

4. Perjanjian Kinerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat mencakup :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1. Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik 2. Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	% Parpol	100 12
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Verifikasi	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Jumlah Lembaga Nirlaba	% LNL	60 5

	Terhadap Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	Lainnya (LNL) yang diawasi		
--	--	----------------------------	--	--

Sedangkan program yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk Sub Koordinator di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat (Jabatan Fungsional) dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala bidang dan Jabatan Fungsional. Yaitu :

a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri (Fungsional Analisis Kebijakan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1. Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol. 2. Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Dana Bantuan Hibah Partai Politik 3. Jumlah Dokumen yang di Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik	PARPOL Laporan Dokumen	12 12 12

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

b. Sub Koordinator Ormas (Fungsional Analisis Kebijakan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	1. Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi 2. Jumlah Laporan Monitoring Hasil Pengawasan LNL	LNL Laporan	5 1

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja juga sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup Baik	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Perbandingan dan analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

3.1 Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tahun 2022 adalah tahun pemulihan dimana Kabupaten Bangka mulai bangkit dari keterburukan Pandemi covid 19. Capaian Kegiatan yang tidak tercapai dari tahun 2019 s.d 2021 diakibatkan adanya Refocussing Anggaran yang mengakibatkan pengalihan anggaran serta konsentrasi pemerintah kabupaten Bangka terfokus pada penanganan covid-19. Untuk Tahun 2022 sudah mulai adanya kegiatan walaupun tidak seluruhnya yang direncanakan bisa dilaksanakan tetapi lebih baik dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Namun demikian seluruh sumber daya yang ada tetap dimaksimalkan guna mencapai sasaran-sasaran dan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 maka selanjutnya dilakukan pengukuran capaian dan realisasi kinerja tahun 2022 untuk mengetahui berapa besar realisasi kinerja yang dicapai untuk satu tahun anggaran.

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.2 Sasaran 4 RPJMD “Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut serta membantu ketercapaian sasaran Daerah ke 4 yaitu Meningkatkan Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan dengan Tujuan Meningkatkan Pembangunan Sektor Wisata dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi yang termasuk ke Misi 4 RPJMD yaitu mewujudkan gerbang kota dan Pariwisata berskala Internasional. Dalam mewujudkan misi 4 tersebut melalui Aspek stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum inilah yang menjadi sasaran Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung, melalui upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan antara lain dengan Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial yang bekerjasama dengan Tim Forkopimda, Melaksanakan Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui kerjasama dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka, Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pencegahan potensi konflik yang ada di Kabupaten Bangka. Sehingga apabila stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bangka meningkat disertai dengan meningkatnya Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka sehingga jumlah jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan akan terjadi peningkatan.

3.1.3 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Sasaran 1 "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan"

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tiga sasaran strategis dan tiga Indikator kinerja. Pada tahun 2022, indikator kinerja untuk sasaran Meningkatkan Wawasan Kebangsaan belum memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 78,43%. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari (Jumlah kegiatan Bidang wawasan kebangsaan yang terealisasi /Jumlah yang di rencanakan x 100%). Jumlah Kegiatan dari Sasaran Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan sebanyak 4 Kegiatan tetapi yang dilaksanakan hanya 3 kegiatan yang terealisasi sedangkan 1 kegiatan tidak dilaksanakan. Sedang Target rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan.

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	(Jumlah peserta yang dibina pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan /Jumlah yang di rencanakan X 100%) + (Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Ketahanan sosial dan budaya/Jumlah yang direncanakan X 100%) + (Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah target yang ditetapkan X 100%) + (Jumlah Laporan Penanganan Orang Asing/JumlahTarget yang ditetapkan X 100%))/4	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pada tabel 3.2 terlihat bahwa tingkat pencapaian Kinerja Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dengan Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan dari target 85% dan terealisasi 78,43%, capaian ini jelas belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target untuk sasaran ini disebabkan adanya Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan. Adapun sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan** dengan Indikator 'Jumlah Peserta Seminar Wawasan Kebangsaan yang hadir' dengan target 60 orang. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan oleh Ketidakmampuan PPTK dalam mengkoordinasi dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas dalam membantu proses kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pernyataan PPTK yang tidak mau menandatangani pencairan anggaran, di karenakan yang bersangkutan baru di bidang tersebut dan sudah memasuki masa pensiun. Sehingga capaian untuk variabel Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terealisasi 0 %. Sedangkan untuk Variabel **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah** dengan dengan dua Indikator yaitu pertama Indikator "Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama" dengan target 60 Orang dan Indikator kedua "Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang di Fasilitasi" dengan target 1 Forum dapat dilaksanakan dan terealisasi 100%. Sedangkan untuk variabel dengan sub kegiatan **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator "Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing"** dengan target 1 Laporan dapat dilaksanakan dan

teralisasi dengan capaian 100%. Sedangkan untuk variabel sub kegiatan yang keempat yaitu **Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Indikator "Jumlah Laporan Forkopimda" dengan Target 1 Laporan terealisasi dengan capaian 100%.

b. Sasaran 2 "Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat "

Untuk sasaran kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat' sudah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 65%. Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari (Jumlah kegiatan Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat yang terealisasi /Jumlah yang di rencanakan x 100%). Jumlah Kegiatan dari Sasaran Persentase Cakupan Politik dan Organsiasi Masyarakat sebanyak 2 Kegiatan dengan Target rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.

Tabel 3.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	(Jumlah kegiatan bidang Politik dan Organisasi Masyarakat yang terealisasi /Jumlah yang direncanakan X 100%)	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
a	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	(Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Bantuan keuangan Parpol) / (Jumlah Parpol yang mendapatkan suara) x 100 % + (Jumlah anggota partai politik yang dibina) / (Target yang direncanakan) x 100 %) / 2	Bidang Politik
b	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	(Jumlah LNL yang di awasi / Target Renstra X 100 %) / 2	Bidang Organisasi Masyarakat

Untuk sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat tercapai 65% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari dua variabel sub kegiatan yaitu yang pertama **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah** dengan dua Indikator yaitu Indikator Pertama "Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan" dengan target 72 Orang dan Indikator yang kedua "Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol" dengan Target 12 Parpol dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan capaian 100%. Sedangkan untuk variabel perhitungan sub kegiatan yang kedua yaitu **sub kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah** dengan Indikator "Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi" dengan target 5 LNL tahun 2022. Jumlah LNL yang di awasi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 18 LNL dari 60 LNL yang merupakan target Renstra dengan pencapaian 30 %. Sehingga untuk Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat dengan target 65 % di peroleh 100 % + 30 % menjadi 65 %. Sehingga Target yang direncanakan untuk tahun 2022 dengan capaian 100 %.

Adapun capaian dan realisasi kinerja tahun 2022 untuk Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dan hasil pengukuran Sasaran tersebut dengan indikatornya dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangka Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	2022			
					Target Tahunan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	6	7	8	9
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	1.1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85	85	66,67	78,43
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2.1	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65	65	65	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB (70,10)	BB (71,51)	BB (71,51)	

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Sasaran dengan Tahun
Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	SATUAN	Realisasi				Target Renstra 2022 (%)
			2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	70	62.50	78,43	85
2	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	Persen	94,34	100	100	100	65
3	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Persen	CC	BB (70,10)	71,51	71,51	71,51

Untuk tahun ke-empat tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil

menunjukkan capaian yang baik dibandingkan dari tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2020 s.d 2022.

3.1.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Tahun 2022 merupakan tahun di mana Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Kegiatan yang semula pada tahun 2019 s.d 2020 dilakukannya Refocussing Anggaran sehingga realisasi tidak tercapai. Untuk Tahun 2022 ini mulai adanya kegiatan walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan dan tereralisasi. Pada masa pemulihan ini lah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan segala keterbatasannya dapat memenuhi target tujuan perangkat daerah yaitu **Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum** dan sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat** .

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini, di antaranya:

- a) Dukungan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
- b) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Bangka seperti FKUB, FPK, dan FORKOPIMDA.
- c) Dukungan warga Kabupaten Bangka secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Bangka.
- d) Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

Ada beberapa faktor yang menjadi Penghambat tidak tercapainya indikator sasaran ini, di antaranya:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dan Berkualiatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan.

- c. Keterbatasan Jumlah SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
- e) Penempatan Pejabat Struktural yang tidak memiliki kemampuan koordinasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan serta memiliki masa kerja yang lebih lama dan belum memasuki masa pensiun.
- f) Ketidakmampuan PPTK dalam mengkoordinasi dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta pernyataan yang bersangkutan tidak mau menandatangani pencairan anggaran, di karenakan yang bersangkutan baru di bidang tersebut dan sudah memasuki masa pensiun.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2022.

Tabel 3.6
Persentase Capaian Program Tahun 2022

No	Nama Program	Formulasi	Target Tahun 2022	Target Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	BB (70,10)	BB (71,51)	BB (71,51)
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(Jumlah Peserta yang memiliki Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terealisasi/ Jumlah yang direncanakan) x 100 %	90%	80%	0%

3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	(Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Bantuan keuangan Parpol) / (Jumlah Parpol yang mendapatkan suara) x 100 % + (Jumlah anggota partai politik yang dibina) / (Target yang direncanakan) x 100 %) / 2	100%	100%	100%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LNL yang di awasi / Target Renstra X 100 %)	60%	60%	30%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	(Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan toleransi dan kerukunan) / (Target yang direncanaan) x 100%	90%	80%	100%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Orang Asing yang diselesaikan /target yang direncanakan dalam 1 tahun) x 100 % + Jumlah laporan Forkopimda yang di selesaikan /arget yang direncanakan x 1001%/2	90%	80%	100

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 0% dari target 85%. Kegiatan ini tidak tercapai karena tidak dilaksanakan dikarenakan Ketidakmampuan PPTK dalam mengkoordinasi dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas dalam membantu proses kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pernyataan PPTK yang tidak mau menandatangani pencairan anggaran, di karenakan yang bersangkutan baru di bidang tersebut dan sudah memasuki masa pensiun. Program Kegiatan ini direncanakan di Triwulan ke II tetapi sampai triwulan ke III juga belum dilaksanakan, sehingga dilakukan negoisasi yaitu pengalihan

anggaran pada kegiatan lain tetapi PPTK tidak menyetujuinya dengan alasan kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan di Triwulan ke IV serta rencana Pengalihan PPTK ke Jabatan Struktural yang lain tetapi tidak di setujui oleh yang bersangkutan. Sehingga sampai akhir Triwulan ke empat tetap tidak dilaksanakan sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik

Ada Dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini, yaitu Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat tercapai 100% dari target 100 %. Untuk indikator pertama formulanya adalah Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol dibagi Jumlah Parpol yang mendapatkan suara dipemilu dikalikan 100% sehingga $12/12 \times 100\% = 100\%$ sedangkan Indikator ke dua yaitu Jumlah Parpol yang mendapatkan Pembinaan Parpol/Target yang direncanakan dikalikan 100% sehingga $72 \text{ Parpol}/72 \times 100\% = 100\%$

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Papol



Dokumentasi Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



Dokumentasi Pembinaan Partai Politik



3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Jumlah LNL yang terdaftar Di Kabupaten Bangka berdasarkan target Renstra untuk Jumlah LNL yang ada di Kabupaten Bangka sebanyak 60 LNL tetapi Ormas yang sudah dilakukan pembinaan dan Pengawasan dari tahun 2019 sd tahun 2022 sebanyak 18 LNL, yang diformulasikan dengan jumlah LNL yang di awasi dibagi jumlah Target Renstra dikalikan 100% sehingga $18/60 \times 100\% = 30\%$. Rendahnya Jumlah Ormas yang dilakukan Pengawasan dikarenakan kurangngnya alokasi anggaran Badan Kesbangpol sehingga pengawasan terhadap ormas belum optimal.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Ormas di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu



4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Ada dua indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini, yang pertama yaitu Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya dengan formula Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama dibagi Jumlah yang direncanakan dikali 100% sehingga $40/40 \times 100\% = 100\%$. *Dokumentasi Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022*



Pembentukan Kelurahan Bersinar di Kelurahan Sungailiat tahun 2022



indikator yang kedua dari program ini, Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi. Dengan Formulasi ; Jumlah Forum yang difasilitasi dibagi Jumlah Forum yang direncanakan dikalikan 100% sehingga $1 \text{ Forum} / 1 \text{ Forum} \times 100\% = 100\%$.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial dari yang ditargetkan 100% dapat tercapai 100%. Untuk formulasi perhitungan didapatkan dari jumlah Jumlah Laporan Penanganan Orang Asing dibagi Target Laporan yang direncanakan di kali 100% sehingga $1 \text{ laporan} / 1 \text{ Laporan} \times 100\% = 100\%$ dengan Indikator kedua Jumlah Laporan Forkopimda yaitu dengan Formulasi Jumlah Laporan Forkopima dibagi Jumlah Laporan yang direncanakan dikalikan 100% sehingga $1/1 \times 100\% = 100\%$. Tahun 2022 ini tercatat sejumlah 12 Potensi konflik, dan sebanyak 12 yang dapat tertangani, sehingga $(12/12) \times 100\% = 100\%$. Hal ini didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, FORKOPIMDA dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Dalam pencapaian target program ini, masih terdapat kendala seperti Belum Terbentuknya FKDM TK Kecamatan serta belum terbentuknya Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bangka dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran.

Rapat Pemantauan dan Penanganan Orang Asing

Tahun 2022



Rapat Tim Forkopimda

Tahun 2022



Capaian dari 12 Kegiatan yang terdiri dari 20 sub kegiatan dapat dilihat rinciannya sebagai berikut ini:

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.725.010,- atau 99,10 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	dok	5	5	100

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.654.900,- atau 97,70%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Lap	19	19	100

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* Anggaran

Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.281.842.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.207.840.582,- atau 67,27%. Adapun sisa anggaran ini merupakan cadangan anggaran gaji dan tunjangan yang tidak digunakan yaitu Rp. 1.074.002.218,-. Karena adanya Penambahan Anggaran Tunjangan Fungsional pada Anggaran Biaya Tambahan 2022 sedangkan Peraturan Pencairan Tunjangan Fungsional yang belum ada aturan yang jelas dan Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkurang disebabkan Pensiun dan Mutasi. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	bl	12	12	100
2	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2	2	100

3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub kegiatan : *Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.*

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.750.000,- atau 100%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	Stel	16	16	100

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan : *penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 169.152.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.009.841,- atau 99,92%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	bln	12	12	100

5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 46.462.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.184.700,- atau 88,60%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	Paket	1	1	100

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 73.700.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.915.000,- atau 94,90%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Paket	1	1	100

6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

a. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 250.317.225,- dan terealisasi sebesar Rp. 245.170.518,- atau 97,94%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	bln	12	12	100

b. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 31.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.264.209,- atau 85,50%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	bln	12	12	100

c. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 62.802.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.100.580,- atau 98,88%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	bln	12	12	100

7. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

a. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.717.850,- atau 86,20%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	7	7	100

Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara adalah kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit.

b. *Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.952.500,- atau 99,40%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Paket	1	1	100

c. *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.042.800,- atau 99,30%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit	1	1	100

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub kegiatan : *Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*

Anggaran untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.250.000,- atau 7,50%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah peserta seminar wawasan kebangsaan yang hadir	Orang	40	0	0

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub kegiatan : *Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.*

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 972.989.783,- dan terealisasi sebesar Rp. 972.365.083,- atau 99,90%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	Parpol	12	12	100
2.	Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan	Parpol	12	12	100

IV. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub kegiatan : *Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.*

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.741.030,- atau 97,40%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	LNL	5	5	100

V. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub kegiatan : *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 151.990.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 151.930.000 atau 99,96%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	Orang	40	40	100
2	Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	forum	1	1	100

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.328.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.091.800,- atau 99,03%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing	laporan	1	1	100

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 39.202.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.040.610,- atau 97,00%. Secara rinci realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Laporan Forkopimda	laporan	1	1	100

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2022 terjadi perubahan sasaran kinerja dan indikator kinerja, perubahan ini menyesuaikan dengan terjadinya perubahan Renstra Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, sebagaimana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 melalui peraturan Bupati Bangka nomor: 52 tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 serta Sesuai dengan Permandagri nomor 86 tahun 2017 pasal 352 ayat 2 bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD Pada tahun 2020 terdapat 9 Program dan 23 kegiatan. Berikut ini Program dan kegiatan serta capaian tahun 2022 yang diambil dari Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun sebelumnya

Adapun Perbandingan realisasi kinerja dari indikator

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

Tabel 3.1

a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok

Tabel 3.2

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah laporan kinerja yang disusun	19 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap	100%	19 Lap

Analisis Capaian Kinerja :

Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dengan sub Kegiatan *Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi Fisik sebesar 100%. Berdasarkan Uraian tabel 3.1 dan Tabel 3.2.*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran*

Tabel 3.3

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan
3.	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan

Analisis Capaian Kinerja :

Selanjutnya Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* dengan sub Kegiatan *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran dengan Alokasi dana dengan realisasi Anggaran Tahun 2022 67,27%* .
sedangkan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 da 2022 mencapai target berdasarkan pencapaian realisasi Fisik yaitu 100%.
Berdasarkan Uraian tabel 3.3.

3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub kegiatan : *Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.*

Tabel 3.4

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Indeks Profesionalisme Aparatur	64,56	64,66	64,66	64,66	64,66%	64,66
2.	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0	0	0	0	0	0
3.	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	0	16 stel	16 stel	16 stel	100%	16 stel

Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan *administrasi kepegawaian perangkat daerah* dengan sub Kegiatan *Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022* sebesar 100% . sedangkan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dengan indikator Jumlah pakaian Olahraga yang tersedia 0 disebabkan adanya Refocussing anggaran akibat pandemi Covid 19. Sedangkan untuk Tahun 2022 mencapai target berdasarkan pencapaian realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian tabel 3.4

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan : *penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd.*

Tabel 3.5

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan

Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan *administrasi umum perangkat daerah* dengan sub Kegiatan *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022* 99,92% . sedangkan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target berdasarkan pencapaian realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian tabel 3.5

5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	30%	30%	30%	100%	30%

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Tabel 3.6

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.7

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket

Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan *pengadaan barang milik daerah* dengan sub Kegiatan *Pengadaan Mebel* dengan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar 88,60%. Dan Sub Kegiatan *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* dengan *realisasi anggaran sebesar 94,90%*. Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 tidak tercapai yaitu 0 % disebabkan adanya Refocussing Anggaran akibat Pandemi Covid 19 yang menyebabkan terjadinya Pengurangan Anggaran Tahun 2021, sedangkan tahun 2022 mencapai target berdasarkan pencapaian realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian tabel 3.6 dan Tabel 3.7

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.8

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tabel 3.9

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tabel 3.10

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan
2.	Jumlah Layanan Penyediaan Internet yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan

c. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan

Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan sub Kegiatan *Penyediaan Jasa Surat menyurat*, Sub Kegiatan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* dengan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dan Tahun 2022 dari ketiga sub kegiatan tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% Berdasarkan Uraian tabel 3.8 dan Tabel 3.9 , Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase BMD dalam kondisi baik	0%	60%	60%	60%	100%	100%

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

- a. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Kendaraan Roda 4	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	100%	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.12

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.13

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit

Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya Program dan Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Sub Kegiatan *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* dan Sub Kegiatan *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*

Lainnya. Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dari sub kegiatan *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* yang tidak mencapai target yaitu 0% disebabkan Refocussing Anggaran akibat Pandemi Covid 19, sedangkan Pada tahun 2022 ketiga sub kegiatan tersebut mencapai target berdasarkan pencapaian realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian tabel 3.11 dan Tabel 3.12 dan Tabel 3.13.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub kegiatan : Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Tabel 3.14

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0%	80%	0	0%	80%
2.	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0%	80%	0	0%	80%
3.	Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir	0	0	40 Orang	0	0%	40 Orang

Analisis Capaian Kinerja

Program dan Indikator Kinerja Program yang kedua yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan sub Kegiatan *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* dengan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub

Kegiatan pada tahun 2021 tidak mencapai target yang direncanakan karena Refocussing Anggaran akibat Pandemi Covid 19 sehingga terjadinya Pengurangan Anggaran, sedangkan untuk Tahun 2022 realisasi sebesar 0% sehingga tidak mencapai target yang direncanakan.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

Tabel 3.15

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	90%	90%	100%	90%
2.	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik	100%	100%	100%	100	100%	100%
3.	Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	12	12	12 Parpol	12 Parpol	100%	12 Parpol
4.	Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	100%	72 Orang

Analisis Capaian Kinerja

Program dan Indikator Kinerja Program yang ketiga yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang direncanakan berdasarkan Realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian Tabel 3.15.

IV. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Tabel 3.16

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	50%	30%	60%	30%	50%	60%
2.	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50%	30%	60%	30%	50%	60%
3.	Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	5 LNL	5 LNL	5 LNL	5 LNL	100%	5 LNL

Analisis Capaian Kinerja

Program dan Indikator Kinerja Program yang keempat yaitu Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang direncanakan berdasarkan Realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian Tabel 3.16.

V. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Tabel 3.17

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	50%	100%	80%	80%	100%	80%
2.	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	50%	100%	80%	80%	100%	80%
3.	Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan	0	40 Orang (20 Laki-Laki dan	40 Orang (20 Laki-Laki dan	40 Orang (20 Laki-Laki dan	100%	40 Orang (20 Laki-Laki dan 20

	Kerukunan dalam kehidupan Beragama		20 Perempuan)	20 Perempuan an	20 Perempuan n		Perempuan
	Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang di Fasilitas	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	100%	1 Forum

Analisis Capaian Kinerja

Program dan Indikator Kinerja Program yang kelima yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 yaitu pada Indikator Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama tidak mencapai target yang direncanakan yaitu 0% karena adanya Refocussing Anggaran akibat Pandemi Covid 19 sehingga terjadinya Pengurangan Anggaran sehingga Indikator Kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan realisasi fisik mencapai 50 % dari target yang direncanakan yaitu 80 % , sedangkan untuk Tahun 2022 mencapai target yang direncanakan berdasarkan Realisasi Fisik yaitu 100%. Berdasarkan Uraian Tabel 3.17.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	100%	100%	80%	80%	100%	80%

2.	'Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	80%	80%	100%	80%
----	---	------	------	-----	-----	------	-----

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Tabel 3.18

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.19

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi		Uraian Tahun 2022			Target RPJMD 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Jumlah Laporan Forkopimda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan

Analisis Capaian Kinerja

Program dan Indikator Kinerja Program yang keenam yaitu Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Outcome dan output dari kegiatan dan Sub Kegiatan kedua sub kegiatan

tersebut pada tahun 2021 maupun tahun 2022 mencapai target yang di rencanakan berdasarkan realisasi Fisik yaitu 100% Berdasarkan Uraian tabel 3.18 dan Tabel 3.19.

Untuk lebih jelasnya berikut ini perbandingan Keseluruhan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan Tabel 3.20 :

Tabel 3.20
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021 DAN 2022

NO	KODE REKENING	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2021				2022			
					TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1			2	3					4	4	6	7
	8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	71.10	71.10	71.10	71.10	71,10	71,51	71,51	71,51
I	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22,00	22,00	22,00	22,00	26.50	26.50	26.50	26.50
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,00	10,00	10,00	10,00	11.00	11.00	11.00	11.00
	8.01.01.2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	8.01.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	8.01.01.2.01.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI					0%	0%	0%	0%
	8.01.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar					100%	100%	100%	100%
				Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar					100%	100%	100%	100%
	8.01.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
				Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Indeks Profesionalisme Aparatur	64.56	0	0	0	64.66	64.66	64.66	64.66
	8.01.01.2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	18,75%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	0	0	0	100%	100%	100%	100%

				Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	0	0	0	100%	100%	100%	100%
	8.01.01.2.05.02		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel	0	0	0	16 Stel	16 Stel	16 Stel	100%
	8.01.01.2.05.09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4	0	0	0	-	-	-	-
				Indeks Sarana dan Prasarana	60	60	60	60	65.00	65.00	65.00	65.00
				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,75	1,75	1,75	1,75	1.85	1.85	1.85	1.85
	8.01.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8.01.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12	12	12	100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	8.01.01.2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	20%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%
	8.01.01.2.07.05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	1	0	0	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	8.01.01.2.07.06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1	0	0	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	8.01.01.2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3	3	3	3	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan
	8.01.01.2.08.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	12	12	12	100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	8.01.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12	12	12	100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
				Jumlah Layanan Penyediaan Internet yang tertangani	12	12	12	100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	8.01.01.2.08.04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12	12	12	100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	8.01.01.2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	60%	60%	60%	100%	65%	60%	60%	100%
	8.01.01.2.09.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda	2 Unit Kendaraan Roda Empat	2 Unit Kendaraan Roda Empat	100	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	100%
	8.01.01.2.09.06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1	1	1	100	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	8.01.01.2.09.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1	0	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

2		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan		Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	80%	80%	50%	62,50%	85%	85%	66,67%	78,43%
II.	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
				Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	40%	40%	40%	90%	80%	0	0%
	8.01.02.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	40%	40%	40%	90%	90%	0	0%
	8.01.02.2.01.04		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir	60 Orang (30 orang laki-laki dan 30 orang Perempuan)	0	0	0	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	0	0%
	8.01.02.2.01.05		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Monitoring Gerakan Revolusi Mental	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	-	-

				<i>Jumlah peserta pelatihan revolusi Mental</i>	<i>60 Orang (30 orang laki-laki dan 30 orang Perempuan)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
3		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat		Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	60%	60%	60%	100%	65%	65%	65%	100%
III.	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
				Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	80%	80%	80%	100%	90%	90%	90%	100%
	8.01.03.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	8.01.03.2.01.03		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan</i>	72	0	0	0	72 Orang	72 Orang	72 Orang	100%

			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	12	12	12	100	12 Parpol	12 Parpol	12 Parpol	100%
IV.	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
				Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	50%	50%	21%	42%	60%	60%	30%	50%
	8.01.04.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50%	50%	21%	42%	60%	60%	30%	50%
	8.01.04.2.01.03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	5 LNL	5 LNL	5 LNL	100	5 LNL	5 LNL	5 LNL	100%
V.	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									

				Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	80%	40%	40%	40%	90%	80%	80%	100%
	8.01.05.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	80%	40%	40%	40%	90%	80%	80%	100%
	8.01.05.2.01.03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	60 Orang (30 orang laki-laki dan 30 orang Perempuan)	0	0	0	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	100%
				Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang di Fasilitasi	1 Forum	1 Forum	1 Forum	100%	1 Forum	1 Forum	1 Forum	100%
VI.	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
				Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	80%	80%	80%	80%	90%	80%	80%	100%
	8.01.06.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%	80%	80%	80%	90%	80%	80%	100%

8.01.06.2.01.05		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
8.01.06.2.01.06		Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forkopimda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel 3.20 diketahui bahwa dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan penamaan dan pengelompokan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2021 dan 2022. Pengelompokan tersebut berdasarkan Permendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 dengan indikator dan target yang ditetapkan, maka terdapat kegiatan yang sama yang dapat dibandingkan yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan ini Pada tahun 2021 dan 2022 dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2021, dengan Indikator Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir. Untuk Target 2021 60 Orang dengan capaian 0% dikarenakan adanya Refocussing Anggaran dan realokasi anggaran oleh pemerintah Kabupaten akibat Pandemi Covid 19. Sedangkan untuk Tahun 2022 dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan target 40 Orang (20 Orang Laki-laki dan 20 Orang Perempuan) tidak dilaksanakan sehingga realisasi 0%.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan Indikator Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol dengan target 12 Parpol dan Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan dengan target 72 Orang. Kegiatan yang berhubungan dengan partai politik ini untuk tahun 2021 dan 2022 dapat dilaksanakan 100% dengan jumlah 12 partai politik yang mendapatkan suara.

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pada tahun 2021 kegiatan ini dilaksanakan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan 2 indikator yaitu pertama, Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dengan target 1 Forum dengan capaian 100% dan kedua Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama tidak dapat dilaksanakan karena adanya refokusing dan realokasi anggaran oleh pemerintah Kabupaten. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dapat dilaksanakan 100 % dengan 2 indikator yaitu Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang di fasilitasi dengan Target 1 Forum dan Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama dengan Target 40 Orang (20 Orang laki-laki dan 20 orang perempuan) dengan capaian realisasi 100%.

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- a. Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indicator Jumlah Laporan Pemantauan Orang asing dengan target 1 Laporan dapat dilaksanakan dengan capaian 100%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah Laporan Forkpimda dengan target 1 Laporan dapat dilaksanakan dengan capaian 100%.

5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indicator Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi dapat dilaksanakan dengan capaian 100% dengan target 5 LNL, namun jika dibandingkan dengan target renstra 60 LNL maka capaian kegiatan ini hanya 21% Untuk Tahun 2021 dan 30 % untuk Tahun 2022. Kondisi ini dikarenakan kondisi anggaran yang disetujui oleh pemerintah kabupaten Bangka sehingga ditetapkanlah target hanya 5 LNL untuk tahun 2021 maupun 2022.

Untuk capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	1.1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	80	50	62,50
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2.1	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	60	60	100.00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	B (70,10)	B (70,51)	

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	1.1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85	85	66,67	78,43
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2.1	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65	65	65	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB (70,10)	BB (71,51)	BB (71,51)	

Pada tabel 3.21 dan 3.21 dapat dilihat terjadi peningkatan capaian realisasi Sasaran Strategis pada tahun 2022 dibandingkan capaian pada tahun 2021. Untuk sasaran strategis "Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat" dengan Indikator Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebesar 60 % dengan pencapaian 100%, maupun pada tahun 2022 juga dengan target yang ditetapkan sebesar 65 % juga capaian realisasi 100%. Sedangkan untuk sasaran "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan" dengan Indikator "Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan " pada tahun 2021 dari target 80% hanya tercapai 50% yang disebabkan oleh refokusing dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bangka akibat pandemi covid 19. Sedangkan pada tahun 2022 dari target 85% hanya tercapai 78,43% yang disebabkan adanya satu sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang tidak dilaksanakan. Capaian Realisasi Tahun 2022 sudah

mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2021 dikarenakan tidak adanya Refocussing anggaran dan Realokasi anggaran serta pandemi Covid 19 yang sudah menurun.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja Rencana Strategis

Rencana strategis adalah rencana target kinerja yang disusun untuk 5 tahun kedepan dari pelaksanaan RPJMD Bupati terpilih 2019-2023. Tahun 2022 adalah tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD tersebut. Jika dibandingkan capaian tahun keempat dengan target kinerja sasaran strategis maka dapat disimpulkan bahwa target capaian tahun 2022 belum sesuai dengan target kinerja Renstra sebesar 100%. Capaian ini disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Badan Kesabangpol serta SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka. Serta Hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja Renstra adalah ketersediaan penganggaran yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Dalam dokumen anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja, sehingga sangat mempengaruhi capaian target kinerja tahunan/Renja dengan target Renstra.

3.4 Perbandingan Kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikatakan Nihil.

3.5 Analisis keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusinya

Realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dapat disimpulkan telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja, walaupun ada beberapa target yang belum tercapai tetapi dibandingkan dari tahun 2021, realisasi kinerja pada tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari target yang direncanakan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada tahun 2022 antara lain:

- Adanya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang cukup jelas pembagian tugas dan fungsi masing-masing bidang.
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara masing-masing bidang dan unit organisasi.
- Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur.
- Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik dengan rata-rata berpendidikan Sarjana.

Analisis keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Analisa dan Alternative Solusi

No	Indikator	Uraian/Analisa	Alternative Solusi
1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	Tingkat capaian untuk indikator ini hanya 78,43% dari 1 variabel kegiatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan 2 variabel Sub kegiatan forkopimda dan Pelaporan penanganan orang asing. Sedangkan pelaksanaan pembinaan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan tidak dilaksanakan.	- Sosialisasi Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang tidak dilaksanakan sebaiknya di anggarkan lagi di tahun berikutnya serta Penempatan Pejabat yang mempunyai kemampuan manajerial serta adanya penambahan SDM yang berkualitas dan berkompeten sehingga realisasi kegiatan Bankesbangpol dapat tercapai di tahun berikutnya. - FKUB agar dapat berperan aktif dalam pembinaan ketahanan sosial, budaya serta kerukunan antar umat beragama dan suku yang ada.

2	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	Untuk cakupan politik dapat dilaksanakan 100% namun untuk pengawasan terhadap Ormas atau LNL belum sepenuhnya dapat tercapai mengingat jumlah LNL yang ada dengan anggaran yang tersedia masih sangat terbatas.	- Menghimbau kepada Ormas/LNL dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban legalitas dan kepengurusannya ke Badan Kesbangpol. - Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam menjangkau keberadaan LNL. - Memanfaatkan media sosial dalam berkoordinasi dan berkomunikasi tentang legalitas dan kepengurusan Ormas/LNL.
---	--	---	--

3.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pada dasarnya realisasi sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran terjadi karena telah melakukan efisiensi. Adapun Gambaran efisiensi penggunaan anggaran pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3.24
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi (pagu-serapan)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	78,43	88,74	11,26
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	100	100	0
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	100	97.01	2,99

Dari tabel diatas dapat dilihat :

- Indikator Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan dengan pagu anggaran Rp. 282.291.000,- dan setelah terjadi perubahan Rp. 276.611.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 245.459.310,- dan sisa anggaran Rp. 31.151.690,- atau 11,26%. Dari jumlah Rp. 276.611.000,- tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- merupakan dana hibah yang diberikan kepada FKUB Kabupaten Bangka dan sebesar **Rp. 95.459.310,-** yang merupakan anggaran untuk sub kegiatan teknis dalam mendukung capaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka.
- Indikator Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 982.989.783,- serta terealisasi Rp. 982.106.113,- atau 99,91%. Dari anggaran sebesar Rp. 982.989.783,- tersebut sebesar **Rp. 951.155.433,-** merupakan dana bantuan partai politik.
- Indikator Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol dengan pagu anggaran Rp. 657.874.820,- dan setelah terjadi perubahan Rp. 771.085.145,- dan terealisasi sebesar Rp. 742.487.908,- dan sisa anggaran Rp. 28.597.237,- atau 3,71%. Jumlah realisasi anggaran ini adalah untuk belanja langsung dan tidak termasuk belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan ASN).

3.7 Analisis program/kegiatan/Subkegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Secara langsung jika dilihat dari program , kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen anggaran yang telah ditetapkan dapat dinyatakan bahwa program , kegiatan dan sub kegiatan sangat menunjang pencapaian pernyataan kinerja namun dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran menyebabkan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sehingga Pencapaian pernyataan kinerja tidak sepenuhnya didukung oleh program, kegiatan dan Sub kegiatan.

Permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal, yang antara lain adalah:

a. Faktor internal

1. Sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memenuhi standar kerja.
2. Jumlah SDM yang masih terbatas.
3. Jumlah anggaran yang tersedia belum sesuai dengan perencanaan.
4. Profesional dan integritas aparatur yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan.
5. Sistem dan proses kerja yang belum optimal dan sistematis.
6. Proses administrasi yang belum berjalan dengan baik.
7. Pemahaman terhadap tupoksi dan aspek kerja yang masih kurang.

b. Faktor eksternal

1. Jumlah organisasi sosial yang fokus pada bidang kesatuan bangsa.
2. Jumlah forum lintas agama yang fokus pada penguatan kesatuan bangsa.
3. Jumlah lembaga masyarakat yang fokus pada bidang kesatuan bangsa.
4. Jumlah forum lintas agama, organisasi masyarakat dan lembaga penelitian yang aktif dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
5. Jaringan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dengan organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan forum keagamaan yang fokus pada bidang kesatuan bangsa dan Politik.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, maka strategi pemecahan masalah yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mengarah pada :

- 1) Peningkatan koordinasi dan integrasi yang didukung oleh system kerja dan manajerial yang optimal.
- 2) Optimalisasi penggunaan sarpras dan anggaran.
- 3) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran secara offline maupun online.
- 4) Peningkatan kerjasama dan komunikasi antara lembaga daerah, ormas, serta lembaga vertikal lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.102.813.103,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.923.155.603,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.179.657.500,-, setelah terjadi Perubahan anggaran tambahan untuk Belanja Langsung Rp. 2.030.685.928,- serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.281.842.800,-, perubahan ini disebabkan Penambahan Anggaran Tunjangan Fungsional bagi ASN, Rapat- Rapat Koordinasi serta Sub Kegiatan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya.

Dengan demikian jumlah anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebesar Rp. 5.312.528.728,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung tersebut dijabarkan ke dalam 6 Program 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci kinerja Keuangan yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Badan Kesbangpol Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH PENGELUARAN ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 3,179,657,500	Rp 3,281,842,800	Rp 2,207,840,582	67.27
	Belanja Pegawai	Rp 3,179,657,500	Rp 3,281,842,800	Rp 2.207,840,582	67.27
B	BELANJA LANGSUNG	Rp 1,923,155,603	Rp 2,030,685,928	Rp 1,970,053,331	97.01
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 657,874,820	Rp 771,085,145	Rp 742,487,908	96.29
I.I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27,000,000	Rp 45,000,000	Rp 44,379,910	98.62
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 12,000,000	Rp 30,000,000	Rp 29,725,010	99.08

2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 14,654,900	97.70
I.II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 9,750,000	Rp 9,750,000	Rp 9,750,000	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 9,750,000	Rp 9,750,000	Rp 9,750,000	100.00
I.III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 114,152,620	Rp 169,152,620	Rp 169,009,841	99.08
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp 114,152,620	Rp 169,152,620	Rp 169,009,841	99.92
I.IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 113,662,800	Rp 120,162,800	Rp 111,099,700	92.46
1	Pengadaan Mebel	Rp 39,962,400	Rp 46,462,400	Rp 41,184,700	88.64
2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 73,700,400	Rp 73,700,400	Rp 69,915,000	94.86
I.V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 310,089,400	Rp 345,019,725	Rp 334,535,307	96.96
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 215,286,900	Rp 250,317,225	Rp 245,170,518	97.94
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 32,000,000	Rp 31,900,000	Rp 27,264,209	85.47
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 62,802,500	Rp 62,802,500	Rp 62,100,580	98.88
I.VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 83,220,000	Rp 82,000,000	Rp 73,713,150	89.89
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 58,850,000	Rp 58,850,000	Rp 50,717,850	86.18
2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 9,220,000	Rp 8,000,000	Rp 7,952,500	99.41
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Rp 15,150,000	Rp 15,150,000	Rp 15,042,800	99.29
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 2,250,000	7.50

II.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 2,250,000	7.50
1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 2,250,000	7.50
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELLAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 972,989,783	Rp 972,989,783	Rp 972,365,083	99.94
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 972,989,783	Rp 972,989,783	Rp 972,365,083	99.94
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 972,989,783	Rp 972,989,783	Rp 972,365,083	99.94
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 9,741,030	97.41
IV.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 9,741,030	97.41
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 9,741,030	97.41

V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp 180,000,000	Rp 183,080,000	Rp 181,076,900	98.91
V.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 180,000,000	Rp 183,080,000	Rp 181,076,900	98.91
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Da Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Rp 180,000,000	Rp 183,080,000	Rp 181,076,900	98.91
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 72,291,000	Rp 63,531,000	Rp 62,132,410	97.80
VI.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 72,291,000	Rp 63,531,000	Rp 62,132,410	97.80
1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Rp 31,788,500	Rp 24,328,500	Rp 24,091,800	99.03
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40,502,500	Rp 39,202,500	Rp 38,040,610	97.04
JUMLAH		Rp 5,102,813,103	Rp 5,312,528,728	Rp 4,177,893,913	78.64

Berdasarkan tabel 3.24 dapat diketahui bahwa dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 3,281,842,800** yang merupakan Anggaran Gaji dan Tunjangan lainnya terealisasi sebesar **Rp 2,207,840,582** atau 67,27%. Realisasi tersebut sesuai dengan jumlah ASN dan jabatan yang ada pada struktur jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, terjadinya penurunan realisasi Anggaran Gaji pada tahun

2021 sebesar 75,90% terjadi penurunan di tahun 2022 disebabkan adanya Pensiunan Pegawai Badan Kesbangpol dan mutasi ke Instansi lain. Selain itu sisa Gaji dan Tunjangan juga merupakan anggaran antisipasi penambahan jumlah pegawai.

Untuk Belanja Langsung tersedia anggaran sebesar **Rp 2,030,685,928** dan terealisasi sebesar **Rp 1,970,053,331,-** atau **97,01 %**. Dari jumlah realisasi tersebut sebesar **Rp. 951.155.433,-** untuk hibah bantuan partai politik dan sebesar **Rp. 150.000.000,-** untuk hibah kepada FKUB Kabupaten Bangka. Dengan demikian jumlah anggaran yang ada pada Badan Kesbangpol sebesar **Rp. 1.101.155.433,-** digunakan untuk hibah, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung capaian kinerja sebesar **Rp. 868.897.898,-**. Selanjutnya dari jumlah tersebut sebesar **Rp. 742.487.908,-** digunakan untuk kegiatan penunjang urusan pemerintahan atau kegiatan rutin kantor, sedangkan untuk kegiatan teknis hanya sebesar **Rp. 126.409.990,-**. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari anggaran **Rp. 5.102.813.103,-** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 4.177.893.913,-** atau dengan capaian **83,94%**.

c. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa mitra yang senantiasa bekerjasama. Mitra-mitra pendukung ini berasal dari berbagai instansi dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka, dan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas, dibentuklah tim dan forum, di antaranya:

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. FKUB Kabupaten Bangka dibentuk melalui Keputusan Bupati Bangka Nomor 239 Tahun 2021.

b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

FPK dibentuk dengan Keputusan Bupati Bangka nomor 1145 Tahun 2021 dan memiliki fungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik melalui pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik.

c) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kabupaten Bangka, forum ini diketuai Bupati Bangka dan beranggotakan Wakil Bupati Bangka, Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka. Forkompida ini dibentuk untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota, dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di Kabupaten Bangka.

d) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Bangka

TKD di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh Daerah tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas Kabupaten Bangka. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/ instansi diantaranya Polresta, Kesbangpol, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

e) Tim Pengawasan Orang Asing

Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Orang Asing yang tidak memiliki surat Izin tinggal di Kabupaten Bangka Badan Kesbangpol melakukan Mitra dengan Kantor Imigrasi dengan cara melakukan pemeriksaan surat izin tinggal bekerjasama dengan Instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri, Kodim.

f) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Badan Kesbangpol bersinergi dengan KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan mengenai demokrasi dan kepemiluan sebagai bentuk usaha meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum mendatang.

g) Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu)

Banwaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Bangka. Badan Kesbangpol bersama dengan KPU juga bekerjasama dengan Banwaslu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepemiluan (Pendidikan Politik) terutama untuk generasi muda, kelompok perempuan dan tokoh masyarakat.

h) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Dalam Melakukan Pembinaan Paskibraka Badan Kesbangpol juga mitra dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kompi dan Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

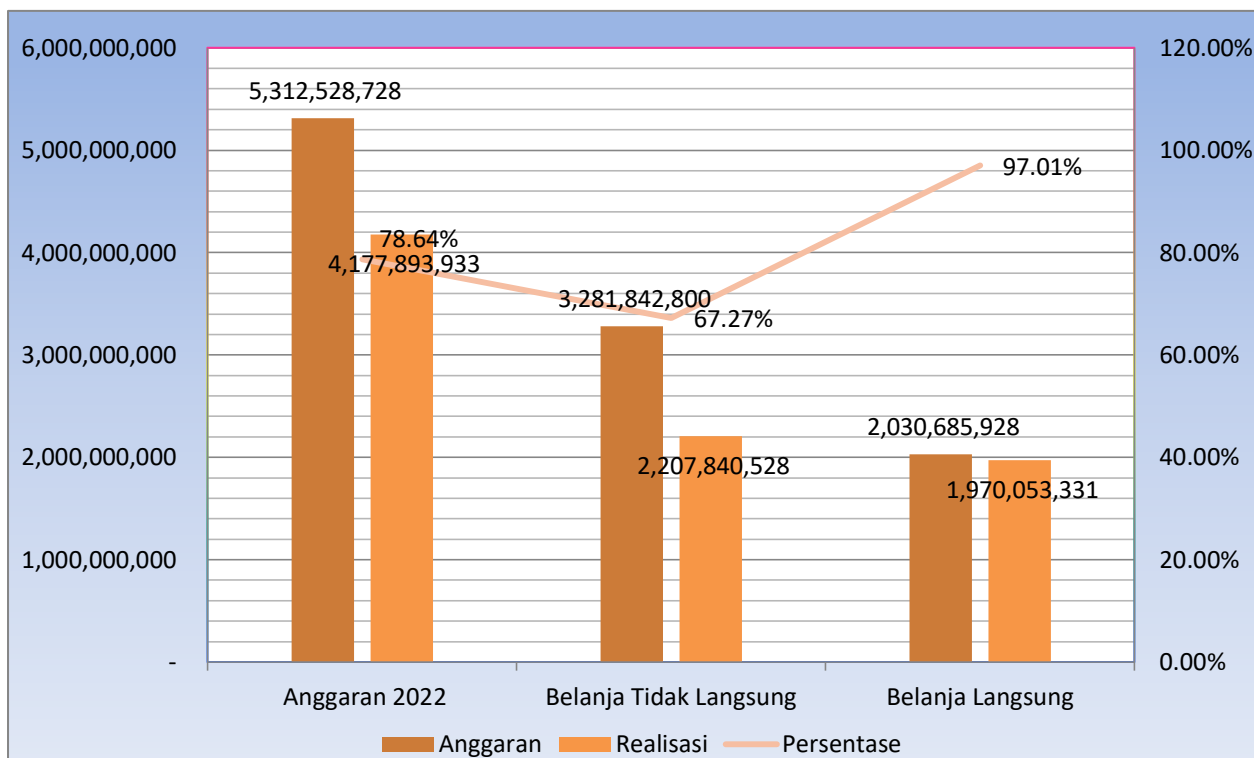
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan kinerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Laporan kinerja juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*.

Tahun 2022 adalah Tahun keempat pelaksanaan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Bangka periode 2019-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan urusannya mengacu kepada Visi Kabupaten Bangka yaitu Visi **Bangka Setara**, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berusaha mengoptimalkanseluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih Sejahtera dan Mulia. Sesuai dengan harapan terwujudnya "Bangka Setara", maka yang jadi fokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung Misi Pembangunan Kabupaten Bangka 2019-2023 adalah Misi ke empat yaitu **""Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional""**.

Berdasarkan pembahasan dan analisa capaian kinerja yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capain kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2022 dengan predikat **baik** walaupun masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya.

Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik Anggaran dan Realisasi
Tahun Anggaran 2022**



Pada Grafik diatas dapat dilihat bahwa anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 5.312.528.728 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.281.842.800,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.030.685.928,- dengan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar 78,64%. Untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 67,27%, yang merupakan komponen dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Badan Kesbangpol. Sedangkan untuk belanja langsung yang merupakan realisasi dari Kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesbangpol sebesar 97.01%, Capaian ini dapat dikatakan **Sangat Baik** khususnya dalam realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan teknis.

B. Rencana Tindak Lanjut

Hasil capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2022 akan dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Selanjutnya perlu dilakukan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- 1) Peningkatan koordinasi dan integrasi yang didukung oleh system kerja dan manajerial yang optimal.
- 2) Optimalisasi penggunaan sarpras dan anggaran.
- 3) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran secara offline maupun online.
- 4) Peningkatan kerjasama dan komunikasi antara lembaga daerah, ormas, serta lembaga vertikal lainnya.
- 5) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan

Laporan kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Tindak lanjut yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja

Untuk meningkatkan Pencapaian Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik yang telah direncanakan maka dapat dilakukan berbagai cara yaitu :

- a. Menyusun Rencana Aksi atas Target Kinerja secara berkala.

Untuk meningkatkan Target Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Awal Tahap awal perencanaan kegiatan menyusun Rencana Aksi setiap Bidang. Dalam tahap penyusunan Rencana Aksi dilakukan dengan Rapat seluruh pegawai.

Dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Aksi Rencana awal



- b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala (Triwulan) melalui Rapat Evaluasi Rencana Aksi secara Triwulan Perbidang.

Untuk melihat tercapai atau tidaknya Rencana Aksi yang telah direncanakan di awal tahun maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Triwulan per bidang.

Dokumentasi Rapat Rencana Aksi Triwulan ke I



Dokumentasi Rapat Rencana Aksi Triwulan ke II



Dokumentasi Rapat Rencana Aksi Triwulan ke III



c. Melakukan Monitoring Pencapaian Kinerja secara Periodik.

Dalam meningkatkan Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan Monitoring ke seluruh Kecamatan. Tujuan Monitoring untuk mengevaluasi permasalahan di lapangan terkait hambatan dalam pencapaian kinerja. Monitoring dilakukan di delapan Kecamatan se – Kabupaten Bangka dengan hasil yang terdiri dari :

1. Setiap Kecamatan mengusulkan di tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik sehingga setiap Kecamatan mempunyai persepsi yang sama mengenai konflik.
2. Setiap Kecamatan mengusulkan sosialisasi tata cara pengisian Blanko Laporan Konflik Sosial yang dikirimkan setiap triwulan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena masih banyaknya aparat di Kecamatan/Desa /Kelurahan tidak memahami cara pengisian blanko tersebut.

Dokumentasi Monitoring Rencana Aksi ke Kecamatan Riau Silip



Dokumentasi Monitoring Rencana Aksi ke Kecamatan Mendo Barat



LAMPIRAN LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA 2022
2. PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN
3. SOP PENYUSUNAN LAKIN
4. TINDAK LANJUT LHE 2021
5. DUKUMENTASI KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANGKA TAHUN 2022



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. DALYAN AMRIE
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

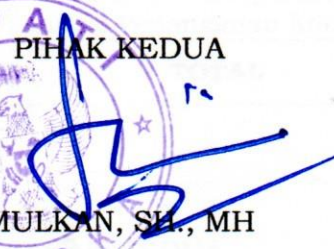
Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



MULKAN, SH., MH



Sungailiat, 21 Januari 2022
PIHAK PERTAMA



Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002



PERJANJIAN KINERJA

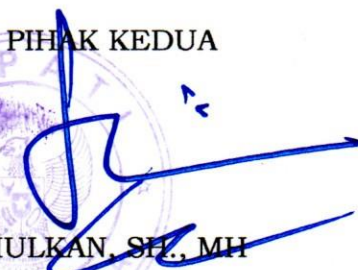
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATAUN	TARGET
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85,00
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	BB (70,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.837.532.320,00	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30.000.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	972.989.783,00	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.000.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	180.000.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	72.291.000,00	APBD
TOTAL		5.102.813.103,00	

Sungailiat, 21 Januari 2022

PIHAK KEDUA



MULKAN, SH., MH

PIHAK PERTAMA



Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRA JAYA, S.Ag
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. M. DALYAN AMRIE
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002**

PIHAK PERTAMA

**PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar 2. Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun 2. Jumlah laporan kinerja yang disusun	% % Dokumen Laporan	100 100 5 19
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar 2. Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar. 1. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani 2. Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	% % Bulan Dokumen	100 100 12 2
3.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi 2. Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu 3. Persentase aparatur yang berkinerja baik Jumlah Pakaian Olah Raga yang Tersedia	% % % Stell	18,75 100 100 16
4.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	% Bulan	100 12
5.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah 1. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	% Paket	30 1

		2.	Jumlah Mebel Kantor yang Diadakan	Paket	1
6.	Sasaran Kegiatan : Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	%	100
		2.	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Layanan	3
		1.	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Bulan	12
		3.	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Bulan	12
		4.	Jumlah layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12
7.	Sasaran Kegiatan : Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	%	65
		1.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Paket	1
		2.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	(7 unit) Kendaraan Roda Dua dan 5 unit Kendaraan Roda Empat
		3.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000,00	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.179.657.500,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.179.657.500,00	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.152.620,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.152.620,00	APBD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.662.800,00	

a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	39.962.400,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.700.400,00	APBD
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.089.400,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	215.286.900,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.802.500,00	APBD
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.220.000,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.850.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.220.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.150.000,00	APBD
TOTAL		3.837.532.320,00	

PIHAK KEDUA


Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


PUTRA JAYA S Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
Jabatan : Kabid.Ideologi Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. M. DALYAN AMRIE
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002**

PIHAK PERTAMA

**HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pemantapan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Peserta Seminar Wawasan Kebangsaan yang hadir	% Orang	80 40
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	% Orang	90 40

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan arakter Kebangsaan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180.000.000,00	APBD
TOTAL	210.000.000,00	

PIHAK KEDUA



Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MULYADI, M.SI
Jabatan : Kabid.Politik Dalam Negeri dan Ormas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. M. DALYAN AMRIE
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002**

PIHAK PERTAMA

**Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	% Parpol	100 12
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Terhadap Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	% LNL	60 5

	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	972.989.783,00	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.000.000,00	APBD
	TOTAL	982.989.783,00	

PIHAK KEDUA



Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002

Sunggailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mapilindo, S.Pd
Jabatan : Kabid.Wasnas dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. M. DALYAN AMRIE
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002**

PIHAK PERTAMA

**MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sasaran Sub Kegiatan : a. Terlaksananya Pemantauan Orang Asing b. Terlaksananya FORKOPIMDA	Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing Jumlah Laporan Forkopimda	% Laporan Laporan	90 2 1

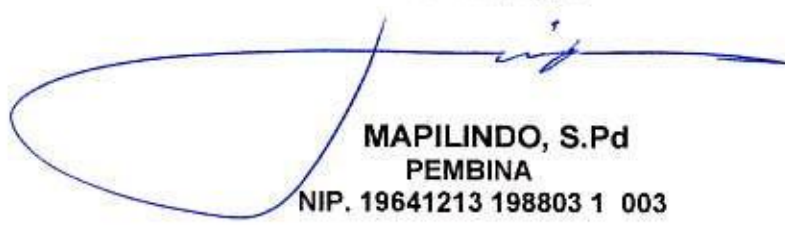
No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31.788.500,00	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	40.502.500,00	APBD
TOTAL		72.291.000,00	

Sunggailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670427 198603 1 002


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIYANA, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB
KOORDINATOR PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA JAYA, S.Ag
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I**

NIP. 19680327 199003 1 002

PIHAK PERTAMA

**ELIYANA, S.AP
PENATA**

NIP. 19830221 200501 2006

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	5
		2. Jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan	19
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	Bulan	12
		2. Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2
		3. Jumlah Dokumen Pencairan yang di Verifikasi	Dokumen	12
		4. Jumlah Dokumen SPP dan SPM SIPD dan SIMDA	Dokumen	24

PIHAK KEDUA


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


ELIYANA, S.AP
PENATA
NIP. 19830221 200501 2006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINA, A.MKL
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA JAYA, S.Ag
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TKI
NIP. 19680327 199003 1 002

PIHAK PERTAMA


RINA, A.MKL
PENATA
NIP. 19820629 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	Stell	16
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	Bulan	12
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	1
		2. Jumlah mebel kantor yang diadakan	Paket	1
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
		2. Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Bulan	12
		3. Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Bulan	12
		4. Jumlah layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Paket	1
		2. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	7

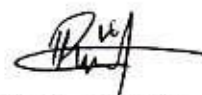
PIHAK KEDUA



PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

Sunggailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



RINA, A.MKL
PENATA
NIP. 19820629 200701 2 020



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002**

PIHAK PERTAMA

**RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	1. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seminar Wawasan Kebangsaan yang hadir	Orang	40

PIHAK KEDUA



HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURDIN HANGTUAH, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**HJ. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002**

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

**NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA
NIP. 19650624 200701 1 002**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama 2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 3. Jumlah Forum Kerukunan umat beragama yang difasilitasi 4. Tersediannya Laporan Penggunaan Dana Hibah FKUB	Orang Laporan Forum Laporan	40 1 1 1

PIHAK KEDUA



H.J. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

Sunggailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA
NIP. 19650624 200701 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG SUPRIADI, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIGEN)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAPILINDO, SPd
Jabatan : KEPALA BIDANG WASNAS DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

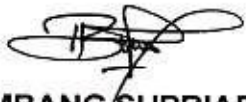
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003


BAMBANG SUPRIADI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19720521 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya FORKOPIMDA	Jumlah Laporan Forkopimda	Laporan	1

PIHAK KEDUA



MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA

NIP. 19641213 198803 1 003

Sunggailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



BAMBANG SUPRIADI, S.IP
PENATA TK I

NIP. 19720521 201001 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARIDAH, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
PENANGANAN KONFLIK)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAPILINDO, SPd
Jabatan : KEPALA BIDANG WASNAS DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA

NIP. 19641213 198803 1 003


PARIDAH, S.IP
PENATA MUDA TK I
NIP. 19710920 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing	Laporan	1

PIHAK KEDUA


MAPI LINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


PARIDAH, S.IP
PENATA MUDA TK I
NIP. 19710920 200701 2 020



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CORRY KRISYHNA,SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. MULYADI, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORMAS

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

PIHAK PERTAMA

CORRY KRISYHNA,SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1. Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol. 2. Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Dana Bantuan Hibah Partai Politik 3. Jumlah Dokumen yang di Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik	PARPOL Laporan Dokumen	12 12 12

PIHAK KEDUA


Drs. MULYADI, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

Sunggailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


CORRY KRISYANA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARLI, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG ORMAS)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. MULYADI, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORMAS
Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001**

PIHAK PERTAMA

**SUHARLI, S. IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	1. Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi 2. Jumlah Laporan Monitoring Hasil Pengawasan LNL	LNL Laporan	5 1

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA



Drs. MULYADI, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

PIHAK PERTAMA



SUHARLI, S. IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESTIA, S.KOM
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ELIYANA, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**ELIYANA, S.AP
PENATA**

NIP. 19830221 200501 2006

PIHAK PERTAMA

**RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA**

NIP. 19880120 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Tercumpulnya Bahan Penyusunan Capaian Kinerja	Berkas	19
		2. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	19
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Tersedianya Dokumen Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	24
		2. Tersedianya Laporan Keuangan yang disusun	Laporan	2
		3. Tersedianya Bahan/ Berkas Pencairan	Berkas	150
		4. Tersedianya Dokumen Pengentrian SPP dan SPM SIPD dan Simda	Dokumen	24

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

ELIYANA, S.AP
PENATA
NIP. 19830221 200501 2006

PIHAK PERTAMA


RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA
NIP. 19880120 201101 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MENNY ERFRIYANTI HERDANITA, A.MD
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RINA, A.MKL
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**RINA, AMKL
PENATA
NIP. 19820629 200701 2 003**

PIHAK PERTAMA

**MENNY ERFRIYANTI HERDANITA, A.MD
PENATA MUDA
NIP. 19860426 201001 2 006**

PERJANJIAN KINERJA

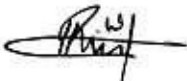
**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Penyediaan pakaian olahraga	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas Pengadaan Pakaian Olahraga	Berkas	1
		2	Tersedianya Dokumen Pengadaan Belanja Pakaian Olahraga	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	Berkas	12
		2	Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangan	Dokumen	12
3.	Terlaksannaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Terkumpulnya Bahan / Berkas Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Berkas	1
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas Pengadaan Mebel	Berkas	1
		2.	Tersedianya Dokumen Mebel	Dokumen	1
5.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Berkas	12
		2	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Pakai Habis pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1
6.	Terlaksananya layanan penyediaan internet yang tertangani		Tersedianya Berkas Layanan Peyediaan Internet yang tertangani	Berkas	12
	Terlaksannya layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	1.	Tersedianya Berkas Layanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang tertangani	Berkas	12
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Belanja Alat Listrik	Dokumen	1
7.	Terlaksannya layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	1.	Terkumpulnya Bahan / Berkas Layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	Berkas	12
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Alat Kebersihan Kantor	Dokumen	1
8.	Terlasananya Pemeliharaan Peralatan dan	1.	Terkumpulnya bahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Berkas	2

	Perlengkapan kantor	2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	2
9.	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.	Tersedianya bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Roda empat	Unit	7
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dokumen	3
10.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	1.	Tersedianya Berkas/Dokumen dalam Proses Pemeliharaan Gedung Kantor	Berkas	1
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Dokumen	1

PIHAK KEDUA



**RINA, AMKL
PENATA**

NIP. 19820629 200701 2 003

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



**MENNY ERFRIYANTI HERDANITA, A.MD
PENATA MUDA**

NIP. 19860426 201001 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALWI
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN WASBANG)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005

ALWI
PENATA TK I
NIP. 19640607 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	1. Terkumpulnya Bahan kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan	Dokumen	1
		2. Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Seminar Wawasan kebangsaan	Laporan	1
		3. Jumlah Peserta yang Hadir dalam Kegiatan Seminar Kebangsaan	Orang	40

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005

ALWI
PENATA TK I
NIP. 19640607 198503 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUNNAS
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSBUD DAN AGAMA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NURDIN HANGTUAH, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA


NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA
NIP. 19650724 200701 1 002

PIHAK PERTAMA


KHAIRUNNAS
PENATA TK I
NIP. 19640913 198902 1 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	1. Terkumpulnya Bahan dalam Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Dokumen	1
		2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Laporan	1
		3. Terkumpulnya Bahan dalam Proses Verifikasi Dana Hibah FKUB	Dokumen	1
		4. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah FKUB	Laporan	1

PIHAK KEDUA


NURDIN HINGTUAH, SH
PENATA
NIP. 19650724 200701 1 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


KHAIRUNNAS
PENATA TK I
NIP. 19640913 198902 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDIN
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSBUD DAN AGAMA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NURDIN HANGTUAH, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA TK I
NIP. 19650724 200701 1 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


SYARIFUDIN
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	1. Terkumpulnya Bahan dalam Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Dokumen	1
		2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Laporan	1
		3. Terkumpulnya Bahan dalam Proses Verifikasi Dana Hibah FKUB	Dokumen	1
		4. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah FKUB	Laporan	1

PIHAK KEDUA


NURDIN MANGTUAH, SH
PENATA TK I
NIP. 19650724 200701 1 002

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


SYARIFUDIN
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMDANI
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN WASBANG)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

ROMDANI
PENGATUR TK I
NIP. 19730926 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

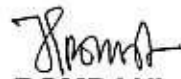
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	1. Terkumpulnya Bahan kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan	Dokumen	1
		2. Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Seminar Wawasan kebangsaan	Laporan	1
		3. Jumlah Peserta yang Hadir dalam Kegiatan Seminar Kebangsaan	Orang	40

PIHAK KEDUA

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005


ROMDANI
PENGATUR TK I
NIP. 19730926 200701 1 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERI JUMAWI
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGRI
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : CORRY KRISYHNA, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG POLITIK)

Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA


CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

PIHAK PERTAMA


FERI JUMAWI
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1. Terkumpulnya Bahan dalam Proses Verifikasi terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	Dokumen	12
		2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik	Laporan	12
		3. Terkumpulnya Bahan dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Bantuan Hibah Partai Politik	Dokumen	1
		4. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penggunaan Dana Hibah bantuan Partai Politik	Laporan	1

PIHAK KEDUA


CORRY KRISYANA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


FERI JUMAWI
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBARNO
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGRI
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : CORRY KRISYHNA, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG POLITIK)

Selaku atasan Pihak Pertama

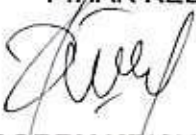
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA


CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

PIHAK PERTAMA


SUBARNO
PENATA TK I
NIP. 19670703 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1. Terkumpulnya Bahan dalam Proses Verifikasi terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	Dokumen	12
		2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik	Laporan	12
		3. Terkumpulnya Bahan dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Bantuan Hibah Partai Politik	Dokumen	1
		4. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penggunaan Dana Hibah bantuan Partai Politik	Laporan	1

PIHAK KEDUA



CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



SUBARNO
PENATA TK I
NIP. 19670703 198603 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAHRIAL
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG ORMAS
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SUHARLI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG ORMAS)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

**SUHARLI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008**

PIHAK PERTAMA

**ZAHRIAL
PENATA MUDA
NIP. 19691127 200701 1 030**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terkumpulnya Bahan dalam Proses Kegiatan Pengawasan LNL	Dokumen	1
		Terverivikasinya Jumlah LNL yang dilakukan Pengawasan	LNL	5
		Tersedianya Bahan Pengumpulan Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Pengawasan LNL	Dokumen	1

PIHAK KEDUA



SUHARLI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



ZAHRIAL
PENATA MUDA
NIP. 19691127 200701 1 030



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AWALLUDIN
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIGEN
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : BAMBANG SUPRIYADI, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIGEN)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK KEDUA

BAMBANG SUPRIYADI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19720521 201001 1 004

PIHAK PERTAMA

AWALLUDIN
PENATA MUDA
NIP. 19730814 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya FORKOPIMDA	1. Terkumpulnya Bahan dalam Proses Kegiatan Forkopimda	Dokumen	1
		2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan FORKOPIMDA	Laporan	1
		3. Terpantaunya Situasi Keamanan dan Ketertiban	Laporan	1

PIHAK KEDUA



BAMBANG SUPRIYADI, S.I.P
PENATA TK I
NIP. 19720521 201001 1 004

Sungailiat, 28 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



AWALLUDIN
PENATA MUDA
NIP. 19730814 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANGKA TAHUN 2022



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEDDY SUDARSONO, M.Si
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

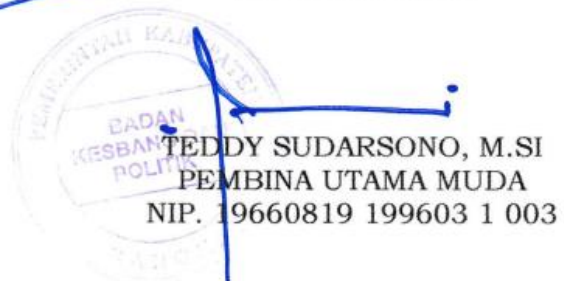
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sungailiat, 10 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA



TEDDY SUDARSONO, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA

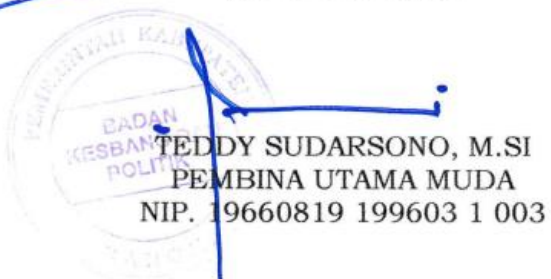
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATAUN	TARGET
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB (71,51)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.052.927.945,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30.000.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	972.989.783,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	183.080.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	63.531.000,00	APBD
TOTAL		5.312.528.728,00	



Sungailiat, 10 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRA JAYA, S.Ag
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. 2. 1. 2.	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun Jumlah laporan kinerja yang disusun	% % Dokumen Laporan	100 100 5 19
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. 2. 1. 2.	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	% % Bulan Dokumen	100 100 12 2
3.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	 1. 2. 3.	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu Persentase aparatur yang berkinerja baik Jumlah Pakaian Olah Raga yang Tersedia	% % % Stell	18,75 100 100 16
4.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	 	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	% Bulan	100 12

5.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	%	30
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Paket	1
		2.	Jumlah Mebel Kantor yang Diadakan	Paket	1
6.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	%	100
		2.	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Layanan	3
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Bulan	12
				Bulan	12
		2.	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Bulan	12
		3.	Jumlah layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12
7.	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	%	60
	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Paket	1
		2.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	(7 unit) Kendaraan Roda Dua dan 5 unit Kendaraan Roda Empat
		3.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.281.842.800,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.842.800,00	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.152.620,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.152.620,00	APBD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.162.800,00	
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	46.462.400,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.700.400,00	APBD
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.019.725,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.317.225,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.900.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.802.500,00	APBD
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.000.000,00	
a..	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.850.000,00	APBD
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	APBD
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.150.000,00	APBD
TOTAL		4.052.927.945,00	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003


PUTRA JAYA S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN
KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAPILINDO, S.Pd

Jabatan : Kabid.Ideologi Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si

Jabatan : PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

PIHAK PERTAMA


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003

PERJANJIAN KINERJA

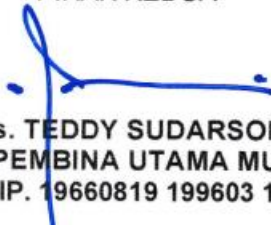
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pemantapan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Peserta Seminar Wawasan Kebangsaan yang hadir	% Orang	80 40
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Seminar/Workshop/FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	% Orang	80 40

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan arakter Kebangsaan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000,00	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	183.080.000,00	APBD
TOTAL		213.080.000,00	

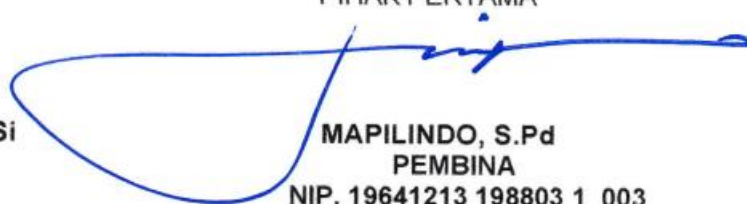
Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA



Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

PIHAK PERTAMA



MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA PERJANJIAN
KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MULYADI, M.SI
Jabatan : Kabid.Politik Dalam Negeri dan Ormas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	% Parpol	100 12
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Verifikasi Terhadap Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	% LNL	60 5

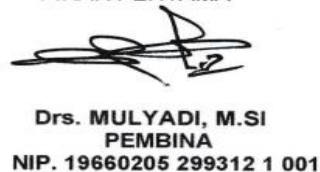
	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	972.989.783,00	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.000.000,00	APBD
TOTAL		982.989.783,00	

PIHAK KEDUA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


Drs. MULYADI, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
Jabatan : Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

PIHAK PERTAMA


Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sasaran Sub Kegiatan : a. Terlaksananya Pemantauan Orang Asing b. Terlaksananya FORKOPIMDA	Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing Jumlah Laporan Forkopimda	% Laporan Laporan	80 2 1

No	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24.328.500,00	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	39.202.500,00	APBD
TOTAL		63.531.000,00	

Sunggailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 003

PIHAK PERTAMA


Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINA, A.MKL
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA JAYA, S.Ag
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

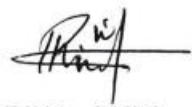
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


RINA, AMKL
PENATA
NIP. 19820629 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

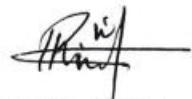
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah		Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	Stell	16
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	Bulan	12
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	1
		2.	Jumlah mebel kantor yang diadakan	Paket	1
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Bulan	12
		3.	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Bulan	12
		4.	Jumlah layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Paket	1
		2.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	7

PIHAK KEDUA


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


RINA, AMKL
PENATA
NIP. 19820629 200903 2 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIYANA, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA JAYA, S.Ag
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


ELIYANA, S.AP
PENATA
NIP. 19830221 200501 2006

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	5
		2.	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan	19
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	Bulan	12
		2.	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2
		3.	Jumlah Dokumen Pencairan yang di Verifikasi	Dokumen	12
		4.	Jumlah Dokumen SPP dan SPM SIPD dan SIMDA	Dokumen	24

PIHAK KEDUA


PUTRA JAYA, S.Ag
PEMBINA TK I
NIP. 19680327 199003 1 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


ELIYANA, S.AP
PENATA
NIP. 19830221 200501 2006



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAPILINDO, S.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

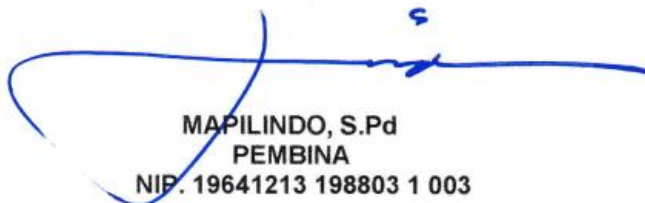
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003


RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA

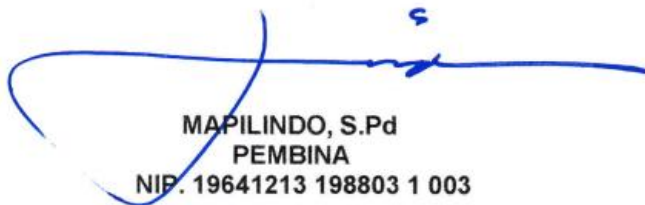
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Seminar/Workshop/FG D Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	1. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seminar Wawasan Kebangsaaan yang hadir	Orang	40

Sunggailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003



RULLY REDHANI, S.AP, M.Si
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURDIN HANGTUAH, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAPILINDO, S.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

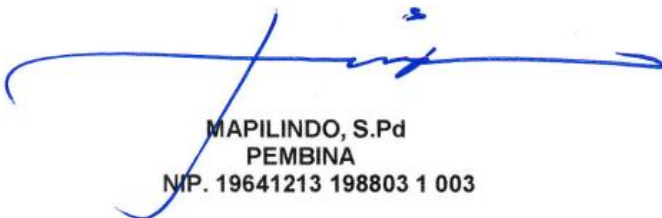
Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

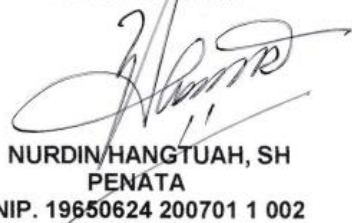
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

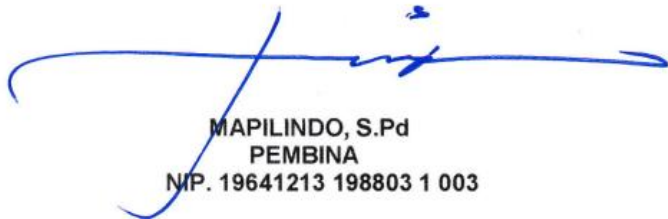

NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA
NIP. 19650624 200701 1 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama 2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 3. Jumlah Forum Kerukunan umat beragama yang difasilitasi 4. Tersediannya Laporan Penggunaan Dana Hibah FKUB	Orang Laporan Forum Laporan	40 1 1 1

PIHAK KEDUA


MAPILINDO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19641213 198803 1 003

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA
NIP. 19650624 200701 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARLI, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG ORMAS)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. MULYADI, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORMAS

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

PIHAK PERTAMA

SUHARLI, S. IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)	1. Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi 2. Jumlah Laporan Monitoring Hasil Pengawasan LNL	LNL Laporan	5 1

PIHAK KEDUA



Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

Sunggailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



SUHARLI, S. IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CORRY KRISYHNA,SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. MULYADI, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORMAS

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. MULYADI, M.SI
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

CORRY KRISYHNA,SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1. Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol. 2. 3. Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Dana Bantuan Hibah Partai Politik Jumlah Dokumen yang di Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik	PARPOL Laporan Dokumen	12 12 12

PIHAK KEDUA



Drs. MULYADI, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660205 299312 1 001

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



CORRY KRISTYANA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARIDAH, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
Jabatan : KEPALA BIDANG WASNAS DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

PARIDAH, S.IP
PENATA MUDA TK I
NIP. 19710920 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing	Laporan	1

PIHAK KEDUA

Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

PARIDAH, S.IP
PENATA MUDA TK I
NIP. 19710920 200701 2 020



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG SUPRIADI, S.IP
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIGEN)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
Jabatan : KEPALA BIDANG WASNAS DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

PIHAK PERTAMA

BAMBANG SUPRIADI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19720521 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya FORKOPIMDA	Jumlah Laporan Forkopimda	Laporan	1

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA



Hj. NYIMAS MEIRIAH RIDHA, SP
PEMBINA
NIP. 19650510 198709 2 002

PIHAK PERTAMA



BAMBANG SUPRIADI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19720521 201001 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MENNY ERFRIYANTI HERDANITA, A.MD
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RINA, A.MKL
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**RINA, AMKL
PENATA
NIP. 19820629 200903 2 003**

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

**MENNY ERFRIYANTI HERDANITA, A.MD
PENATA MUDA
NIP. 19820629 200903 2 005**

PERJANJIAN KINERJA

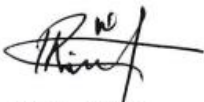
**PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Penyediaan pakaian olah raga	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas Pengadaan Pakaian Olahraga	Berkas	1
		2	Tersedianya Dokumen Pengadaan Belanja Pakaian Olahraga	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	Berkas	12
		2	Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangan	Dokumen	12
3.	Terlaksannaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Terkumpulnya Bahan / Berkas Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Berkas	1
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas Pengadaan Mebel	Berkas	1
		2.	Tersedianya Dokumen Mebel	Dokumen	1
5.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Terkumpulnya Bahan / Berkas dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Berkas	12
		2	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Pakai Habis pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1
6.	Terlaksananya layanan penyediaan internet yang tertangani		Tersediannya Berkas Layanan Peyediaan Internet yang tertangani	Berkas	12
	Terlaksannya layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	1.	Tersediannya Berkas Layanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang tertangani	Berkas	12
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Belanja Alat Listrik	Dokumen	1
7.	Terlaksannya layanan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani	1.	Terkumpulnya Bahan / Berkas Layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	Berkas	12
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Alat Kebersihan Kantor	Dokumen	1
8.	Terlasananya Pemeliharaan Peralatan dan	1.	Terkumpulnya bahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Berkas	2

	Perlengkapan kantor	2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	2
9.	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.	Tersediannya bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Roda empat	Unit	7
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dokumen	3
10.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	1.	Tersediannya Berkas/Dokumen dalam Proses Pemeliharaan Gedung Kantor	Berkas	1
		2.	Tersedianya Dokumen Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Dokumen	1

PIHAK KEDUA



RINA, AMKL
PENATA
NIP. 19820629 200903 2 003

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



MENNY ERFRIYANTI HERDANITA, A.MD
PENATA MUDA
NIP. 19820629 200903 2 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESTIA, S.KOM
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ELIYANA, S.AP
Jabatan : ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR
PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

ELIYANA, S.AP
PENATA
NIP. 19830221 200501 2006

PIHAK PERTAMA

RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA
NIP. 19880120 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Terkumpulnya Bahan Penyusunan Capaian Kinerja	Berkas	19
		2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	19
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Tersedianya Dokumen Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	24
		2.	Tersedianya Laporan Keuangan yang disusun	Laporan	2
		3.	Tersedianya Bahan/ Berkas Pencairan	Berkas	150
		4.	Tersedianya Dokumen Pengentrian SPP dan SPM SIPD dan Simda	Dokumen	24

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA



ELIYANA, S.AP
PENATA
NIP. 19830221 200501 2006

PIHAK PERTAMA



RESTIA, S.KOM
PENATA MUDA
NIP. 19880120 201101 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERI JUMAWI
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGRI
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : CORRY KRISYHNA, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG POLITIK)
Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

CORRY KRISYHNA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

Sungailiat, 10 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA

FERI JUMAWI
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Verifikasi Terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	1.	Terkumpulnya Bahan dalam Proses Verifikasi terhadap Bantuan Hibah Partai Politik	Dokumen	12
		2.	Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik	Laporan	12
		3.	Terkumpulnya Bahan dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Bantuan Hibah Partai Politik	Dokumen	1
		4.	Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penggunaan Dana Hibah bantuan Partai Politik	Laporan	1

PIHAK KEDUA


CORRY KRISYANA, SH
PENATA TK I
NIP. 19690913 200604 2 011

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


FERI JUMAWI
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAHRIAL
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG ORMAS
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SUHARLI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG ORMAS)
Selaku atasan Pihak Pertama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

**SUHARLI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008**

PIHAK PERTAMA

**ZAHRIAL
PENATA MUDA
NIP. 19691127 200701 1 030**

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terkumpulnya Bahan dalam Proses Kegiatan Pengawasan LNL	Dokumen	1
		Terverifikasinya Jumlah LNL yang dilakukan Pengawasan	LNL	5
		Tersedianya Bahan Pengumpulan Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Pengawasan LNL	Dokumen	1

PIHAK KEDUA



SUHARLI, S.IP
PENATA TK I
NIP. 19650112 198603 1 008

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



ZAHRIAL
PENATA MUDA
NIP. 19691127 200701 1 030



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDIN
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSBUD DAN AGAMA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NURDIN HANGTUAH, SH
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA TK I
NIP. 19650724 200701 1 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

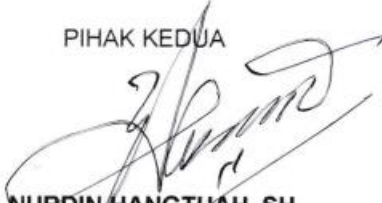

SYARIFUDIN
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	1. Terkumpulnya Bahan dalam Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Dokumen	1
		2. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Laporan	1
		3. Terkumpulnya Bahan dalam Proses Verifikasi Dana Hibah FKUB	Dokumen	1
		4. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah FKUB	Laporan	1

PIHAK KEDUA


NURDIN HANGTUAH, SH
PENATA TK I
NIP. 19650724 200701 1 002

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA


SYARIFUDIN
PENGATUR TK I
NIP. 19780604 201001 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMDANI
Jabatan : PELAKSANA PADA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
Jabatan : ANALISIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN WASBANG)

Selaku atasan Pihak Pertama

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005

PIHAK PERTAMA


ROMDANI
PENGATUR TK I
NIP. 19730926 200701 1 010

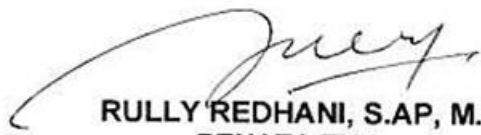
PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

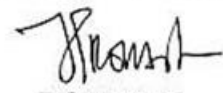
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terlaksananya Seminar/Workshop /FGD Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	1.	Terkumpulnya Bahan kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan	Dokumen	1
		2.	Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Seminar Wawasan kebangsaan	Laporan	1
		3.	Jumlah Peserta yang Hadir dalam Kegiatan Seminar Kebangsaan	Orang	40

Sungailiat, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


RULLY REDHANI, S.AP, M.SI
PENATA TK I
NIP. 19730726 200312 1 005

PIHAK PERTAMA


ROMDANI
PENGATUR TK I
NIP. 19730926 200701 1 010

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
BULAN DESEMBER 2022

ANGGARAN 2022

No	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		KONTRAK/SWAKELOLA					LOKASI	REALISASI				Ket
		TARGET	ANGGARAN	NILAI	NO/TGL	MULAI	SELESAI	PELAKSANA		FISIK (%)	KEU (Rp)	KEU (%)	SISA DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BELANJA LANGSUNG		5,312,528,728							78.64%	4,177,893,913	78.64%	1,134,634,815	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		4,052,927,945							72.79%	2,950,328,490	72.79%	1,102,599,455	
II	PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		45,000,000							98.62%	44,379,910	98.62%	620,090	
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5 Dok	30,000,000							99.08%	29,725,010	99.08%	274,990	
	BELANJA OPERASI		30,000,000							99.08%	29,725,010	99.08%	274,990	
	BELANJA PEGAWAI		600,000							100%	600,000	100%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		600,000							100%	600,000	100%	-	
	Belanja Honorarium		600,000							100%	600,000	100%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		600,000							100%	600,000	100.0%	-	
	Honorarium PPTK		600,000							100%	600,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		29,400,000							99.06%	29,125,010	99.06%	274,990	
	Belanja Barang		3,950,000							93.25%	3,683,450	93.3%	266,550	
	Belanja Barang Pakai Habis		3,950,000	3,683,450						93.25%	3,683,450	93.3%	266,550	

	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		1,890,100	1,850,850	05/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	19 Januari 2022	31 Maret 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	97.92%	1,850,850	97.9%	39,250	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor-Ketas dan Cover		813,400	754,600	04/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	19 Januari 2022	31 Maret 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI		92.77%	754,600	92.8%	58,800	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1,246,500	1,078,000						86.48%	1,078,000	86.5%	168,500	
	Belanja Jasa		7,165,000							99.90%	7,157,500	99.9%	7,500	
	Belanja Jasa Kantor		7,165,000							99.90%	7,157,500	99.9%	7,500	
	Belanja Lembur		7,165,000							99.90%	7,157,500	99.9%	7,500	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		18,285,000							100%	18,284,060	100.0%	940	
													-	
2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19 Lap	15,000,000							97.70%	14,654,900	97.7%	345,100	
	BELANJA OPERASI		15,000,000							97.70%	14,654,900	97.7%	345,100	
	BELANJA BARANG DAN JASA		15,000,000							97.70%	14,654,900	97.7%	345,100	
	Belanja Barang		3,197,500							95.77%	3,062,400	95.8%	135,100	
	Belanja Barang Pakai Habis		3,197,500	3,062,400						95.77%	3,062,400	95.8%	135,100	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		2,573,500	2,490,100	08/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	08 Februari 2022	31 Maret 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	96.76%	2,490,100	96.8%	83,400	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		624,000	572,300	07/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	08 Februari 2022	31 Maret 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI		91.71%	572,300	91.7%	51,700	
	Belanja Jasa		5,242,500							100%	5,242,500	100.0%	-	
	Belanja Jasa Kantor		5,242,500							100%	5,242,500	100.0%	-	
	Belanja Lembur		5,242,500							100.0%	5,242,500	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6,560,000							96.8%	6,350,000	96.8%	210,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		6,560,000							96.8%	6,350,000	96.8%	210,000	

I.II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		3,281,842,800							67.27%	2,207,840,582	67.27%	1,074,002,218	
1.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12 bl	3,281,842,800							67.27%	2,207,840,582	67.27%	1,074,002,218	
	BELANJA OPERASI		3,281,842,800							67.3%	2,207,840,582	67.3%	1,074,002,218	
	Belanja Pegawai		3,281,842,800							67.3%	2,207,840,582	67.3%	1,074,002,218	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		2,560,522,800							61.3%	1,569,980,582	61.3%	990,542,218	
	Belanja Gaji Pokok ASN		1,597,400,000							73.3%	1,170,623,254	73.3%	426,776,746	
	Belanja Gaji Pokok PNS		1,597,400,000							73.3%	1,170,623,254	73.3%	426,776,746	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		224,000,000							40.2%	89,963,490	40.2%	134,036,510	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		224,000,000							40.2%	89,963,490	40.2%	134,036,510	
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		272,720,000							51.9%	141,621,000	51.9%	131,099,000	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		182,000,000							77.8%	141,621,000	77.8%	40,379,000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		90,720,000							0.0%	-	0.0%	90,720,000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		56,000,000							39.1%	21,890,000	39.1%	34,110,000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		56,000,000							39.1%	21,890,000	39.1%	34,110,000	
	Belanja Tunjangan Beras ASN		126,000,000							44.7%	56,342,560	44.7%	69,657,440	
	Belanja Tunjangan Beras PNS		126,000,000							44.7%	56,342,560	44.7%	69,657,440	
	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN		49,000,000							20.4%	9,971,704	20.4%	39,028,296	
	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS		49,000,000							20.4%	9,971,704	20.4%	39,028,296	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN		3,900,000							0.5%	18,361	0.5%	3,881,639	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS		3,900,000							0.5%	18,361	0.5%	3,881,639	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		154,852,800							45.2%	70,042,106	45.2%	84,810,694	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		154,852,800							45.2%	70,042,106	45.2%	84,810,694	

	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		28,000,000							8.5%	2,377,444	8.5%	25,622,556	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		28,000,000							8.5%	2,377,444	8.5%	25,622,556	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		42,000,000							17.0%	7,130,663	17.0%	34,869,337	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		42,000,000							17.0%	7,130,663	17.0%	34,869,337	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		6,650,000							0.0%	-	0.0%	6,650,000	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		6,650,000							0.0%	-	0.0%	6,650,000	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		721,320,000							88.4%	637,860,000	88.4%	83,460,000	
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN		721,320,000							88.4%	637,860,000	88.4%	83,460,000	
													-	
I.III	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		9,750,000							100.0%	9,750,000	100.0%	-	
1.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	16 Stel	9,750,000							100.0%	9,750,000	100.0%	-	
	BELANJA DAERAH		9,750,000							100.0%	9,750,000	100.0%	-	
	BELANJA OPERASI		9,750,000							100.0%	9,750,000	100.0%	-	
	Belanja Pegawai		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan/Honorarium PPTK		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		9,600,000							100.0%	9,600,000	100.0%	-	
	Belanja Barang		9,600,000							100.0%	9,600,000	100.0%	-	
	Belanja Barang Pakai Habis		9,600,000	9,600,000	21/PPBJ/BA NKESBANG	02 Agustus 2022	16 Agustus 2022	CV. DIVIRA	SUNGAi	100.0%	9,600,000	100.0%	-	

	Belanja Pakaian Olahraga		9,600,000		POL/2022				LIAT	100.0%	9,600,000	0%	-	
I.IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		169,152,620							99.92%	169,009,841	99.9%	142,779	
1.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12 bl	169,152,620							99.92%	169,009,841	99.9%	142,779	
	BELANJA OPERASI		169,152,620							99.92%	169,009,841	99.9%	142,779	
	Belanja Pegawai		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas		168,462,620							99.9%	168,319,841	99.9%	142,779	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		158,462,620							99.9%	158,319,841	99.9%	142,779	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		158,462,620							99.9%	158,319,841	99.9%	142,779	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		158,462,620							99.9%	158,319,841	99.9%	142,779	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10,000,000							100.0%	10,000,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dalam Daerah		10,000,000							0.0%	10,000,000.00	0.0%	10,000,000	
I.V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		120,162,800							183.5%	111,099,700	183.5%	9,063,100	
1.	PENGADAAN MEBEL	1 Paket	46,462,400							88.6%	41,184,700	88.6%	5,277,700	
	BELANJA OPERASI		46,462,400							88.6%	41,184,700	88.6%	5,277,700	
	Belanja Pegawai		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	

	Beanja Honorarium		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		893,800							0.0%	-	0.0%	893,800	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		893,800							0.0%	-	0.0%	893,800	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		893,800							0.0%	-	0.0%	893,800	
	BELANJA MODAL		45,268,600							90.3%	40,884,700	90.3%	4,383,900	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		45,268,600							90.3%	40,884,700	90.3%	4,383,900	
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		45,268,600							90.3%	40,884,700	90.3%	4,383,900	
	Belanja Modal Alat Kantor		45,268,600							90.3%	40,884,700	90.3%	4,383,900	
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		5,456,200	5,154,700	26/PPBJ- SP/BANKES BANGPOL/2 022	9-Nov-22	15 November 2022	CV. AMIN ELEKTRONIK	SUNGAI LIAT	94.5%	5,154,700	94.5%	301,500	
	Belanja Modal Mebel		13,233,600	10,980,000	06/PPBJ- SP/BANKES BANGPOL/2 022	24 MARET 2022	06 APRIL 2022	CV. CHINTA UTAMA	SUNGAI LIAT	83.0%	10,980,000	83.0%	2,253,600	
	Belanja Modal Kursi Kerja		13,233,600	10,980,000						83.0%	10,980,000	83.0%	2,253,600	
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		26,578,800	24,750,000						93.1%	24,750,000	93.1%	1,828,800	
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		26,578,800	24,750,000						93.1%	24,750,000	93.1%	1,828,800	
													-	
2.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1 Paket	73,700,400							94.9%	69,915,000	94.9%	3,785,400	
	BELANJA OPERASI		73,700,400							94.9%	69,915,000	94.9%	3,785,400	
	Belanja Pegawai		200,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		200,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
	Beanja Honorarium		200,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		200,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
	BELANJA MODAL		73,500,400							94.8%	69,715,000	94.8%	3,785,400	

	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		73,500,400							94.8%	69,715,000	94.8%	3,785,400	
	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		4,490,800							60.1%	2,700,000	60.1%	1,790,800	
	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA		4,490,800	2,700,000	22/PPBJ/BANKESBANGPOL/2022	24 September 2022	30 September 2022	CV. GRAHA MEGATAMA	SUNGAI LIAT	60.1%	2,700,000	60.1%	1,790,800	
	Belanja Modal Alat Pembersih/Mesin Rumput		4,490,800	2,700,000						60.1%	2,700,000	60.1%	1,790,800	
	BELANJA MODAL KOMPUTER		69,009,600	67,015,000	26/PPBJ-SP/BANKESBANGPOL/2022	09 Mei 2022	07 Juni 2022	PT. CITRA DATA NUSANTARA	SUNGAI LIAT	97.1%	67,015,000	97.1%	1,994,600	
	BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT		61,509,600	59,515,000						96.8%	59,515,000	96.8%	1,994,600	
	BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER		61,509,600	59,515,000						96.8%	59,515,000	96.8%	1,994,600	
	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		7,500,000	7,500,000						100.0%	7,500,000	100.0%	-	
													-	
I.VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		345,019,725							96.96%	334,535,307	96.96%	10,484,418	
1.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12 bl	250,317,225							97.94%	245,170,518	97.94%	5,146,707	
	BELANJA OPERASI		250,317,225							97.9%	245,170,518	97.9%	5,146,707	
	Belanja Pegawai		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		690,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		249,627,225							97.9%	244,480,518	97.9%	5,146,707	
	Belanja Barang		15,786,900							88.8%	14,012,400	88.8%	1,774,500	
	Belanja Barang Pakai Habis		15,786,900							88.8%	14,012,400	88.8%	1,774,500	
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9,424,300	3,063,600	01/PPBJ-SP/BANKESBANGPOL/2022	17 Januari 2022	29 juli 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	90.3%	8,507,200	90.3%	917,100	

				4,363,600	02/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	29 Januari 2022	29 juli 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI						
	Belanjai Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Ketas dan Cover		3,510,400	3,318,200	01/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	17 Januari 2022	29 juli 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	94.5%	3,318,200	94.5%	192,200	
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		900,000							100.0%	900,000	100.0%	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		1,952,200	1,287,000	01/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	17 Januari 2022	29 juli 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	65.9%	1,287,000	65.9%	665,200	
	Belanja Jasa		233,840,325							98.6%	230,468,118	98.6%	3,372,207	
	Belanja Jasa Kantor		210,990,000							98.5%	207,877,500	98.5%	3,112,500	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		132,900,000							97.7%	129,787,500	97.7%	3,112,500	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		76,050,000							100.0%	76,050,000	100.0%	-	
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar / Majalah		2,040,000							100.0%	2,040,000	100.0%	-	
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		22,850,324							98.9%	22,590,618	98.9%	259,706	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN		12,950,324							98.8%	12,798,310	98.8%	152,014	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		369,216							100.0%	369,216	100.0%	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		9,530,784							98.9%	9,423,092	98.9%	107,692	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1							0.0%	-	0.0%	1	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Kota		1							0.0%	-	0.0%	1	
2.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12 bl	31,900,000							85.5%	27,264,209	85.5%	4,635,791	
	BELANJA DAERAH		31,900,000							85.5%	27,264,209	85.5%	4,635,791	
	BELANJA OPERASI		31,900,000							85.5%	27,264,209	85.5%	4,635,791	
	Belanja Pegawai		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	

	Lainnya ASN												
	Belanja Honorarium		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-
	BELANJA BARANG DAN JASA		31,600,000							85.3%	26,964,209	85.3%	4,635,791
	Belanja Barang		2,300,000							100.0%	2,300,000	100.0%	-
	Belanja Barang Pakai Habis		2,300,000							100.0%	2,300,000	100.0%	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		2,300,000	2,300,000	24/PPBJ- SP/BANKES BANGPOL/2 022	13 Oktober 2022	26 Oktober 2022	CV. FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	100.0%	2,300,000	100.0%	-
	Belanja Jasa		29,300,000							84.2%	24,664,209	84.2%	4,635,791
	Belanja Jasa Kantor		29,300,000							84.2%	24,664,209	84.2%	4,635,791
	Belanja Jasa Tagihan Telepon		9,200,000							82.8%	7,615,886	82.8%	1,584,114
	Belanja Tagihan Air		2,600,000							57.3%	1,490,240	57.3%	1,109,760
	Belanja Tagihan Listrik		17,500,000							88.9%	15,558,083	88.9%	1,941,917
3.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12 bl	62,802,500							98.88%	62,100,580	98.88%	701,920
	BELANJA OPERASI		62,802,500							98.9%	62,100,580	98.9%	701,920
	Belanja Pegawai		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-
	Belanja Honorarium		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-
	Belanja Barang dan Jasa		62,202,500							98.9%	61,500,580	98.9%	701,920
	Belanja Barang		5,261,400							88.5%	4,655,300	88%	606,100
	Belanja Barang Pakai Habis		5,261,400							88.5%	4,655,300	88.5%	606,100

	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor / Belanja Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih		5,261,400	4,655,300	03.1/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	17 Januari 2022	05 September 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	88.5%	4,655,300	88.5%	606,100	
	Belanja Jasa		56,941,100							99.8%	56,845,280	99.8%	95,820	
	Belanja Jasa Kantor		51,406,820							99.8%	51,311,000	99.8%	95,820	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		25,350,000							100.0%	25,350,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		25,350,000							100.0%	25,350,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		706,820							86.4%	611,000	86.4%	95,820	
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		5,534,280							100.0%	5,534,280	100.0%	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN		3,134,280							100.0%	3,134,280	100.0%	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		92,304							100.0%	92,304	100.0%	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		2,307,696							100.0%	2,307,696	100.0%	-	
I.VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		82,000,000							284.9%	73,713,150	284.9%	8,286,850	
1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5 unit Kendar aan Roda 2 dan 2 Unit Kendar aan Roda empat	58,850,000							86.2%	50,717,850	86.2%	8,132,150	
	BELANJA OPERASI		58,850,000							86.2%	50,717,850	86.2%	8,132,150	
	Belanja Pegawai		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan / Honorarium		600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	

	PPTK													
	Belanja Barang dan Jasa		58,250,000							86.0%	50,117,850	86.0%	8,132,150	
	Belanja Pemeliharaan		58,250,000							86.0%	50,117,850	86.0%	8,132,150	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		58,250,000							86.0%	50,117,850	86.0%	8,132,150	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan / Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat		58,250,000	8,020,500	01.1/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	17 Januari 2022	06 Juni 2022	CV. KENANGA JAYA	SUNGAI LIAT	86.0%	50,117,850	86.0%	8,132,150	
				7,253,850	29/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	01 Oktober 2022	01 Desember 2022	CV. KENANGA JAYA	SUNGAI LIAT				7,253,850	
2.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1 Paket	8,000,000							99.4%	7,952,500	99.4%	47,500	
	BELANJA OPERASI		8,000,000							99.4%	7,952,500	99.4%	47,500	
	Belanja Pegawai		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		7,550,000							99.4%	7,502,500	99.4%	47,500	
	Belanja Pemeliharaan		7,550,000							99.4%	7,502,500	99.4%	47,500	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		7,550,000							99.4%	7,502,500	99.4%	47,500	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	12 Bln	1,830,000							100.0%	1,830,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa Service AC		1,830,000	1,830,000	23/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	12 Oktober 2022	18 Oktober 2022	CV. AMIN ELEKTRONIK	SUNGAI LIAT	100.0%	1,830,000	100.0%	-	

	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer Peralatan Komputer lainnya		5,720,000	5,672,500	28/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	30 September 2022	30 November 2022	CV. GLOBALINDO PRATAMA	SUNGAI LIAT	99.2%	5,672,500	99.2%	47,500	
3.	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1 Unit	15,150,000							99.3%	15,042,800	99.3%	107,200	
	BELANJA DAERAH		15,150,000							99.3%	15,042,800	99.3%	107,200	
	BELANJA OPERASI		15,150,000							99.3%	15,042,800	99.3%	107,200	
	Belanja Pegawai		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Beanja Honorarium		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		15,000,000							99.3%	14,892,800	99.3%	107,200	
	Belanja Pemeliharaan		15,000,000	14,892,800	027.2/273/SPK/Bankes bangpol/2022	15 Oktober 2022	28 November 2022	CV. PUTRA NUSANTARA	SUNGAI LIAT	99.3%	14,892,800	0%	107,200	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		15,000,000							99.3%	14,892,800	99.3%	107,200	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor		15,000,000							99.3%	14,892,800	99.3%	107,200	
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		30,000,000							7.50%	2,250,000	7.5%	27,750,000	
II.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		30,000,000							7.5%	2,250,000	7.5%	27,750,000	
1.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER	40 Orang	30,000,000							7.5%	2,250,000	7.5%	27,750,000	

	KEBANGSAAN, PEMBAURAN KEBANGSAAN BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN													
	BELANJA OPERASI		30,000,000							7.5%	2,250,000	7.5%	27,750,000	
	Belanja Pegawai		150,000							0.0%	-	0.0%	150,000	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		150,000							0.0%	-	0.0%	150,000	
	Beanja Honorarium		150,000							0.0%	-	0.0%	150,000	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		150,000							0.0%	-	0.0%	150,000	
	Belanja Barang dan Jasa		29,850,000							7.5%	2,250,000	7.5%	27,600,000	
	Belanja Barang		9,621,600							0.0%	-	0.0%	9,621,600	
	Belanja Barang Pakai Habis		9,621,600							0.0%	-	0.0%	9,621,600	
	Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3,731,600							0.0%	-	0.0%	3,731,600	
	Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		120,000							0.0%	-	0.0%	120,000	
	Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer		350,000							0.0%	-	0.0%	350,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,420,000							0.0%	-	0.0%	5,420,000	
	Belanja Jasa		15,150,000							0.0%	-	0.0%	15,150,000	
	Belanja Jasa Kantor		10,150,000							0.0%	-	0.0%	10,150,000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia		4,300,000							0.0%	-	0.0%	4,300,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		5,850,000							0.0%	-	0.0%	5,850,000	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		5,000,000							0.0%	-	0.0%	5,000,000	
	Belanja Sewa Hotel		5,000,000							0.0%	-	0.0%	5,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas		5,078,400							44.3%	2,250,000	44.3%	2,828,400	

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		5,078,400							44.3%	2,250,000	44.3%	2,828,400	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3,280,000							68.6%	2,250,000	68.6%	1,030,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		3,280,000							68.6%	2,250,000	68.6%	1,030,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,798,400							0.0%	-	0.0%	1,798,400	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Kota		1,798,400							0.0%	-	0.0%	1,798,400	
													-	
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMABANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		972,989,783							99.94%	972,365,083	99.9%	624,700	
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK		972,989,783							99.9%	972,365,083	99.9%	624,700	
1.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	12 Parpol	972,989,783							99.9%	972,365,083	99.9%	624,700	

	BELANJA DAERAH		972,989,783							99.9%	972,365,083	99.9%	624,700	
	BELANJA OPERASI		972,989,783							99.9%	972,365,083	99.9%	624,700	
	Belanja Pegawai		280,000							0.0%	-	0.0%	280,000	
	Tamnahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		280,000							0.0%	-	0.0%	280,000	
	Berlanja Honorarium		280,000							0.0%	-	0.0%	280,000	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		280,000							0.0%	-	0.0%	280,000	
	Belanja Barang dan Jasa		21,554,350	4,259,650						98.4%	21,209,650	98.4%	344,700	
	Belanja Barang		4,314,350	4,259,650						98.7%	4,259,650	98.7%	54,700	
	Belanja Barang Pakai Habis		4,314,350	4,259,650						98.7%	4,259,650	98.7%	54,700	
	Belanaj Alat / Bahan untu Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		1,499,350	1,455,850	10/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	11 MARET 2022	17 MARET 2022	CV. FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	97.1%	1,455,850	97.1%	43,500	
	Belanja Alat / Bahan untu Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover		240,000	228,800	09/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	11 MARET 2022	17 MARET 2022	CV. FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	95.3%	228,800	95.3%	11,200	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,575,000	2,575,000	11/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	21 MARET 2022	22 MARET 2022	CV. CENTRA NIAGA CIPTA	SUNGAI LIAT	100.0%	2,575,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa		12,050,000							98.3%	11,850,000	98.3%	200,000	
	Belanja Jasa Kantor		12,050,000							98.3%	11,850,000	98.3%	200,000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3,800,000							94.7%	3,600,000	94.7%	200,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		8,250,000							100.0%	8,250,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas		5,190,000							98.3%	5,100,000	98.3%	90,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		5,190,000							98.3%	5,100,000	98.3%	90,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		4,190,000							97.9%	4,100,000	97.9%	90,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1,000,000							100.0%	1,000,000	100.0%	-	

	Belanja Hibah		951,155,433							100.0%	951,155,433	100.0%	-	
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		951,155,433							100.0%	951,155,433	100.0%	-	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		10,000,000							97.41%	9,741,030	97.4%	258,970	
IV.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		10,000,000							97.4%	9,741,030	97.4%	258,970	
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	5 LNL	10,000,000							97.4%	9,741,030	97.4%	258,970	
	BELANJA OPERASI		10,000,000							97.4%	9,741,030	97.4%	258,970	
	Belanja Pegawai		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Tamnahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Berlanja Honorarium		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		9,850,000							97.4%	9,591,030	97.4%	258,970	
	Belanja Barang		1,930,000							86.6%	1,671,030	86.6%	258,970	
	Belanja Barang Pakai Habis		1,930,000	1,671,030	27/PPBJ- SP/BANKES BANGPOL/2 022	24 September 2022	30 September 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	86.6%	1,671,030	86.6%	258,970	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		1,119,500	1,008,890						90.1%	1,008,890	90.1%	110,610	

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		360,000	359,640						99.9%	359,640	99.9%	360	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer		450,500	302,500						67.1%	302,500	67.1%	148,000	
	Belanja Perjalanan Dinas		7,920,000							100.0%	7,920,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4,920,000							100.0%	4,920,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Luar Daerah		4,920,000							100.0%	4,920,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,000,000							100.0%	3,000,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3,000,000							100.0%	3,000,000	100.0%	-	
													-	
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		183,080,000							98.91%	181,076,900	98.9%	2,003,100	
V.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		183,080,000							98.9%	181,076,900	98.9%	2,003,100	
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	1 Forum + 40 Orang	183,080,000							98.9%	181,076,900	98.9%	2,003,100	
	BELANJA OPERASI		183,080,000							98.9%	181,076,900	98.9%	2,003,100	
	Belanja Pegawai		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Beanja Honorarium		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	

	Belanja Barang dan Jasa		32,930,000							93.9%	30,926,900	93.9%	2,003,100	
	Belanja Barang		9,916,700							94.7%	9,391,900	94.7%	524,800	
	Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9,916,700 4,150,700	3,971,900 3,637,100	13/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	25 MARET 2022	31 MARET 2022	CV. FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	94.7% 87.6%	9,391,900 3,637,100	94.7% 87.6%	524,800 513,600	
	Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		240,000	228,800	12/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	25 MARET 2022	31 MARET 2022	CV. FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	95.3%	228,800	95.3%	11,200	
	Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer		106,000	106,000						100.0%	106,000	100.0%	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,420,000		14/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	25 MARET 2022	26 MARET 2022	CV. NOVILLA	SUNGAI LIAT	100.0%	5,420,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa		14,650,000							100.0%	14,650,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa Kantor		9,650,000							100.0%	9,650,000	100.0%	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia		4,300,000							100.0%	4,300,000	100.0%	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		5,350,000							100.0%	5,350,000	100.0%	-	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		5,000,000	5,000,000	15/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	25 MARET 2022	26 MARET 2022	CV. NOVILLA	SUNGAI LIAT	100.0%	5,000,000	100.0%	-	
	Belanja Sewa Hotel		5,000,000	5,000,000						100.0%	5,000,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas		8,363,300							82.3%	6,885,000	82.3%	1,478,300	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		8,363,300							82.3%	6,885,000	82.3%	1,478,300	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2,783,300							95.6%	2,660,000	95.6%	123,300	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		2,783,300							95.6%	2,660,000	95.6%	123,300	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		5,580,000							75.7%	4,225,000	75.7%	1,355,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Kota		5,580,000							75.7%	4,225,000	75.7%	1,355,000	
	Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial		150,000,000 150,000,000							100.0% 100.0%	150,000,000 150,000,000	100.0% 100.0%	- -	

	yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar													
													-	
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENAGANAN KONFLIK SOSIAL		63,531,000							97.80%	62,132,410	#DIV/0!	1,398,590	
VI.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		63,531,000							97.80%	62,132,410	#DIV/0!	1,398,590	
1.	PELAKSANANAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIGEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	1 Laporan	24,328,500							99.03%	24,091,800	99.03%	236,700	
	BELANJA DAERAH		24,328,500							99.0%	24,091,800	99.0%	236,700	
	BELANJA OPERASI		24,328,500							99.0%	24,091,800	99.0%	236,700	
	Belanja Pegawai		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Berlanja Honorarium		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
			300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		300,000							100.0%	300,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		24,028,500							99.0%	23,791,800	99.0%	236,700	

	Belanja Barang		4,218,500							97.0%	4,091,800	97.0%	126,700	
	Belanja Barang Pakai Habis		4,218,500							97.0%	4,091,800	97.0%	126,700	
	Belanj Alat / Bahan untu Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		1,858,500	1,503,500	22/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	11 juni 2022	17 juni 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	93.2%	1,732,160	93.2%	126,340	
				228,660	19/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	03 Juni 2022	09 juni 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT					
	Belanj Alat / Bahan untu Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		360,000	359,640	19/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	03 Juni 2022	09 juni 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	99.9%	359,640	99.9%	360	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,000,000							100.0%	2,000,000	100.0%	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,000,000	2,000,000	20/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	08 Juni 2022	09 Juni 2022	CV. CENTRA NIAGA Cipta	SUNGAI LIAT	100.0%	2,000,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa		8,750,000							100.0%	8,750,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa Kantor		8,750,000							100.0%	8,750,000	100.0%	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderatr, Pembawa Acara dan Panitia		1,400,000							100.0%	1,400,000	100.0%	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		7,350,000							100.0%	7,350,000	100.0%	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		11,060,000							99.0%	10,950,000	99.0%	110,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		11,060,000							99.0%	10,950,000	99.0%	110,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6,560,000							99.1%	6,500,000	99.1%	60,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		6,560,000							99.1%	6,500,000	99.1%	60,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4,500,000							98.9%	4,450,000	98.9%	50,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		4,500,000							98.9%	4,450,000	98.9%	50,000	
2.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Laporan	39,202,500							97.0%	38,040,610	97.0%	1,161,890	
	BELANJA DAERAH		39,202,500							97.0%	38,040,610	97.0%	1,161,890	
	BELANJA OPERASI		39,202,500							97.0%	38,040,610	97.0%	1,161,890	

	Belanja Pegawai		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Berlanja Honorarium		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan / Honorarium PPTK		450,000							100.0%	450,000	100.0%	-	
	Belanja Barang dan Jasa		38,752,500							97.0%	37,590,610	97.0%	1,161,890	
	Belanja Barang		6,942,500							95.2%	6,610,610	95.2%	331,890	
	Belanja Barang Pakai Habis		6,942,500							95.2%	6,610,610	95.2%	331,890	
	Belanja Alat / Bahan untu Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		2,074,600	1,825,840	18/PPBJ-SP/BANKES BANGPOL/2022	03 Juni 2022	09 juni 2022	CV FIRDAUS YAMAN HURI	SUNGAI LIAT	88.0%	1,825,840	88.0%	248,760	
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		480,000	479,520						99.9%	479,520	99.9%	480	
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer		387,900	305,250						78.7%	305,250	78.7%	82,650	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,000,000							100.0%	4,000,000	100.0%	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forkominda		4,000,000	2,000,000	16.02/PL/PK-SP/BANKES BANGPOL/2022	09 Noember 2022	10 November 2022	CV. CENTRA NIAGA CIPTA	SUNGAI LIAT	100.0%	4,000,000	100.0%	-	
	Belanja Jasa		19,500,000	2,000,000	16.01/PL/PK-SP/BANKES BANGPOL/2022	30 Maret 2022	31 Maret 2022	CV. CENTRA NIAGA CIPTA	SUNGAI LIAT	96.2%	18,750,000	96.2%	750,000	
	Belanja Jasa Kantor		19,500,000							96.2%	18,750,000	96.2%	750,000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		2,800,000							100.0%	2,800,000	100.0%	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		16,700,000							95.5%	15,950,000	95.5%	750,000	
	Belanja Perjalanan Dinas		12,310,000							99.4%	12,230,000	99.4%	80,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri		12,310,000							99.4%	12,230,000	99.4%	80,000	

	Belanja Perjalanan Biasa		7,790,000							99.2%	7,730,000	99.2%	60,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		7,790,000							99.2%	7,730,000	99.2%	60,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4,520,000							99.6%	4,500,000	99.6%	20,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		4,520,000							99.6%	4,500,000	99.6%	20,000	
JUMLAH			5,312,528,728	-	-	-	-	-	-	78.64%	4,177,893,913	78.64%	1,134,634,815	

**FOTO NARASUMBER KEGIATAN RAPAT TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
KAMIS, 09 JUNI 2022**



Dokumentasi Kegiatan Rapat Forkopimda Kamis,
31 Maret 2022



KEGIATAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN , PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)



KEGIATAN HARI ANTI NARKOTIKA NASIONAL (HANI)





KEGIATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA





Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022



Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



tanda Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



Pengawasan partai politik PAN Di desa Kimak Kecamatan Merawang



Penyerahan LHP terkait Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Lampiran Data Pendukung



Proses penjelasan mengenai syarat-syarat dalam pendaftaran ormas



Koordinasi di kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu terkait Pemantauan Ormas Majelis Tak'lim Nurul Hidayah



Koordinasi di kecamatan Riau Silip dan Desa Berbura terkait Pemantaun Ormas PaudPermata Bunda Bernai

MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

NO.	KOMPONEN	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	OPD telah memiliki Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan target tahunan	Menyusun rencana Aksi atas target kinerja secara berkala (Triwulan) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di perjanjian kinerja dan dipantau secara periodik	Rencana Aksi sudah disusun berdasarkan target Kinerja secara Berkala (Triwulan) dan dilakukan Evaluasi per triwulan
		Penetapan Target kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis	Melakukan Monitoring Pencapaian kinerja secara periodik berdasarkan jadwal , mekanisme atau SOP yang jelas, mendokumentasikan hasil monitoring dan menindaklanjuti hasil monitoring pencapaian kinerja tersebut	Sudah dilakukan Monitoring dan Pencapaian Kinerja secara Periodik berdasarkan Jadwal, Mekanisme atau SOP yang jelas.
		Monitoring atas Rencana Aksi atas Kinerja yang dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dan belum dijadikan dasar untuk penerapan reward dan punishment	Menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang dapat menggambarkan langkah kerja pengumpulan data dari sumber yang valid, melalui tahap verifikasi dan validasi untuk menjamin keakuratan data	Sudah dilakukan Penyempurnaan SOP Pengumpulan Data Kinerja dari tahap verifikasi dan validasi
2	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja belum dikembangkan melalui teknologi Informasi	Melakukan Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dalam pemberian reward dan punishment	Sudah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala terhadap hasil rencana aksi melalui Evaluasi rencana Aksi perbidang secara periodik (Triwulan)
		Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi kriteria indikator yang baik, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja. salah satu kriteria pemanfaatan IKU untuk penilaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar pemberian insentif atau disinsentif.	Mengumpulkan data kinerja berdasarkan mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan datanya, mencatat, siapa yang mensupervisi dan sumber data valid	Mengumpulkan data Kinerja sudah berdasarkan mekanisme yang memadai atau terstruktur

		Hasil Pengukuran Capaian kinerja mulai dari tingkat Eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishmen	Mengumpulkan data kinerja berdasarkan mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan datanya, mencatat, siapa yang mensupervisi dan sumber data valid	Mengumpulkan data Kinerja sudah berdasarkan mekanisme yang memadai atau terstruktur
		Pengumpulan data kinerja belum dilengkapi bukti dan pertanggungjawaban yang memadai, belum melalui mekanisme yang terstruktur, yakni ada pihak yang mengumpulkan data, mencatat dan mensupervisi.	Laporan Kinerja agar menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dilengkapi bukti data dan pertanggungjawaban perhitungan capaian kinerja yang memadai	Laporan Kinerja sudah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dilengkapi bukti data dan pertanggungjawaban perhitungan capaian kinerja yang memadai
		Sudah tersedia SOP Pengumpulan Data, Namun belum menggambarkan pengumpulan Data kinerja yang up to date dan mekanisme jika terjadi kesalahan data. Proses Pengumpulan Data yang diharapkan adalah pengumpulan data kinerja dari masing-masing unit kerja yang mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang oleh Pejabat yang bertanggung jawab terhadap data kinerja sesuai dnegan perjanjian kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawab capaian kinerja yang dilakukan secara berkala.		
3	Pelaporan Kinerja	Informasi Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan dan penilaian kinerja		
		Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya		
		Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja disertai kelengkapan bukti dan sumber data yang memadai tentang perhitungan pencapaian realisasi kinerja bukan hanya realisasi kegiatan yang ada dalam DPA.		

4	Evaluasi Internal	Dokumentasi atas informasi rencana /agenda belum memadai terkait pencapaian hasil rencana atau agenda, keberhasilan atau tidak keberhasilan rencana analisis kesimpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.		
		Hasil Evaluasi atas program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang		
		Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan unit kerja sebagai dasar rewards dan punishmen		

Sungailiat,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA**



**KUSYONO ADITAMA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19711114 199303 1 002**



BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANGKA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

(LAKIP)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2023
	Tanggal Revisi	:	Januari 2023
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2023
	Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
	Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); - Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	- Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). - Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. SOP Perjanjian Kinerja	- Renstra OPD - Format penyusunan LAKIP - Dokumen Perjanjian Kinerja - Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD - Laporan Realisasi Keuangan - Perangkat Komputer		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan		
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan Lancar	Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja		

SOP: PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

NO	URAIAN / PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			KETERANGAN
		KEPALA	SEKRETARIS	ANALISIS PERENCANA	STAF	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP		MULAI			Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format Penyusunan LAKIP	2 Jam	Format Penyusunan LAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format Penyusunan LAKIP	1 Jam	Format Penyusunan LAKIP	-
4.	Menghimpun Format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format Penyusunan LAKIP	3 Jam	Format Penyusunan LAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format Penyusunan LAKIP	4 Hari	Draf LAKIP	SOP Perjanjian Kinerja



6.	Membuat Dokumen LAKIP					Draf LAKIP	2 Hari	Dokumen LAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	-
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada KABAN untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kaban kemudian diteruskan ke Analisis Perencana					Dokumen LAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep Surat Pengantar	15 Menit	Surat Pengantar	-
11.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-

